



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KOMPOSISI ANGGARAN APBN PERUBAHAN

Pengaturan alokasi anggaran dalam APBNP 2016 mencerminkan kredibilitas fiskal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dibandingkan belanja kementerian dan lembaga. Waktunya mewujudkan Nawacita.



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 13 APBN-P 2016: Mengawal Kredibilitas Fiskal
- 16 Infografis
- 18 Peningkatan Dana Infrastruktur untuk Daerah
- 21 Suntikan Modal Negara Bagi Program Kesejahteraan
- 23 APBN-P 2016 Konsisten dengan Nawacita

REPORTASE

- 25 Kemenkeu Sosialisasikan Amnesti Pajak pada 2.700 Pengusaha Jatim
- 26 Menkeu Tanda Tangani Perjanjian dengan Bank Penerima Dana Repatriasi

WAWANCARA

- 27 Cara Mayor Edan Mengubah Batang

POTRET KANTOR

- 30 Meluruskan yang Bengkok, Memperkuat yang Lemah

FIGUR

- 32 Juru Bicara Pertama

EKONOMI TERKINI

- 36 Mulai Menatap ke Depan

KOLOM EKONOM

- 40 Menimbang Perlunya Kebijakan Khusus Pasca Brexit

GENERASI EMAS

- 44 Calon Ahli Studi Lintas Budaya

OPINI

- 46 Urgensi Pembentukan Badan dan Penguatan Regeling Otoritas Pajak

REGULASI

- 48 Semua Wajib Pajak Berhak Mendapatkan Pengampunan

INSPIRASI

- 50 Tarian Hati Ayuni

RENUNGAN

- 52 Prioritas, Waktu, dan Masa Depan

FILM

- 53 The Legend of Tarzan: Kisah Klasik yang Dikemas Modern dan Dewasa

KULINER

- 54 Terpikat Pantai-Pantai Sumbawa Barat

SELEBRITI

- 56 Career Break demi Sekolah

57 BUNG PISKAL

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



THE VOICE
THAT YOU RAISE
WOULD BE
SAFE & HEARD.

Suara yang Anda bagi ke kami
adalah suara seorang pemimpin
yang menyuarakan kebenaran.

Setiap tahunnya kami berkomitmen menindaklanjuti ratusan laporan dari pegawai dan masyarakat terkait penyimpangan yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kami meyakini bahwa kerahasiaan identitas pelapor seperti Anda begitu penting untuk terus ikut serta menjadi bagian dari transformasi Kementerian Keuangan.

Whistle blower adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa. Namun, *whistle blower* telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi www.wise.kemenkeu.go.id



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

Lapor
WiSe

Mewujudkan Nawacita melalui APBN-P 2016

Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 telah disepakati dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 28 Juni 2016 lalu. Terdapat beberapa hal strategis yang disepakati pada UU APBN-P 2016.

Pertama, kebijakan pengampunan pajak dalam penetapan target penerimaan perpajakan. Kedua, efisiensi belanja operasional kementerian/ lembaga. Ketiga, pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Keempat, penetapan anggaran transfer ke daerah ditetapkan lebih tinggi dari anggaran Kementerian/ Lembaga. Terakhir, penyediaan dana investasi untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Pada sisi pembiayaan, Penyertaan Modal Negara (PMN) disuntikkan lebih

banyak, khususnya untuk memperkecil *gap* pada dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, sisi pemasukan lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh BPJS. Sementara pengguna BPJS saat ini mencapai sekitar 95 juta orang. Pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber penerimaan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain untuk BPJS, PMN juga digunakan untuk memenuhi salah satu prioritas pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur yang akan terus meningkat hingga 2019. Untuk akselerasi, maka ada penambahan anggaran Rp16 triliun yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) LMAN untuk pembebasan lahan. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian terkait.

Pada APBN-P 2016, untuk pertama kali dalam sejarah penetapan anggaran transfer ke daerah dan dana desa

ditetapkan lebih tinggi dari anggaran Kementerian/Lembaga. Tentunya hal ini ditetapkan untuk mendukung salah satu Nawacita dari Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Pola pembangunan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diperbaiki.

Dana transfer ini akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga, daerah diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pemerintah yakin dengan pemindahan dana yang banyak ke kabupaten kota dalam bentuk transfer ke daerah, dana tersebut dapat langsung digunakan kabupaten kota untuk membangun wilayahnya. APBN-P 2016 ini mendapat dukungan Presiden karena memang dinilai konsisten dengan Nawacita dan konsisten dengan desentralisasi otonomi fiskal.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

#TahukahKamu Pertama kalinya dalam sejarah, anggaran Transfer ke Daerah lebih besar dari belanja K/L. Anggaran Transfer ke Daerah dalam #APBNP2016 sebesar Rp776,3 triliun, sedangkan belanja K/L sebesar Rp767,8 triliun. Yuk, sampaikan optimisme kamu terhadap pemanfaatan dana Transfer ke Daerah yang menunjang pembangunan di daerahmu.

Mustika Witono

@fppu_smi
Dana Desa diperlukan pendampingan yg profesional, agar keuangan yg di transfer ke daerah tidak disalahgunakan.

Burhanuddin

@Burhan_ctf
Dana Desa menurunkan tingkat urbanisasi dan mendorong msg2 warga desa utk membangun desanya

Dwi Puji

Kusumastuti
@Dwipuji_K
saya Yakin jika ada dana transferan utk daerah. Wilayah2 yg ada di Indonesia akn berkmbang & mmbantu progrn nasional.

tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri

Membangun Indonesia dari Daerah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarmo Teguh Widodo (ketiga dari kiri) menghadiri sosialisasi dana desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Maret lalu. Sejalan dengan Nawacita yang digagas Presiden Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa. Pada APBN-P 2016 yang baru disahkan, alokasi dana desa mengalami peningkatan bersama dana transfer ke daerah.

Foto
Adhi Kurniawan



Mainan- Mainan Dugderan

Dugderan adalah ruang rindu bagi siapa saja yang pernah tumbuh besar di Semarang. Pasar kaget yang hanya ada menjelang Ramadan itu menjual beragam mainan tradisional seperti kapal *othok-othok*, miniatur truk dan bus kayu, hingga *gangsingan*. Berbagai wahana seperti komedi putar, tong setan, rumah hantu, hingga kora-kora selalu berhasil membangkitkan memori masa belia. Dugderan berasal dari kata *dug*, bunyi bedug yang ditabuh, dan *der*, bunyi tembakan meriam. Kedua bunyi yang menjadi pertanda bagi masyarakat setempat akan datangnya bulan istimewa.

Foto
Arief
Kuswanadji



27/06 67 Ekor Sapi Laku Dijual Secara Online

Teks DJKN
Foto DJKN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro melakukan lelang 67 ekor Sapi Bangkalan melalui *e-Auction*. Lelang pada Senin (27/06) ini diadakan melalui Aplikasi Lelang Email dengan sistem penawaran tertutup (*closed bidding*). Lelang ini adalah hasil kerja sama KPKNL Metro dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung. Sapi-sapi tersebut merupakan sapi impor yang melebihi kuota yang telah ditetapkan. Sisa lebih tersebut menjadi barang tegahan KPPBC Bandar Lampung dan terjual melalui lelang dengan harga total sebesar Rp968.500.000.



28/06

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

DPR Sahkan RUU Pengampunan Pajak Menjadi UU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (28/06) di Jakarta. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pengesahan RUU tentang *tax amnesty* menjadi UU ini diyakini akan mengurangi maraknya aktivitas perpajakan dalam negeri yang belum/tidak dilaporkan. Pengesahan ini sekaligus menjadi momentum reformasi perpajakan yang komprehensif menuju sistem yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kepastian data yang valid, komprehensif, dan terintegrasi.

27/06

Teks DJKN

Foto DJKN

Pesawat Fokker Pelita Air Berhasil Terjual Rp278 Juta

Pesawat terbang Fokker F-28 milik PT Pelita Air Service (PT. PAS), yang beberapa waktu lalu masuk dalam rencana lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), berhasil terjual dengan harga sebesar Rp278 juta dari nilai limit sebesar Rp213 juta. Pesawat ini terjual setelah melalui proses *e-auction* yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong. KPKNL Serpong membuka penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang Email (*close bidding*) di www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id atas lelang sukarela pesawat terbang milik PT. PAS pada Senin (27/06).



29/06

Teks DJBC

Foto DJBC

Bea Cukai Kembali Gagal Penyelundupan Impor Bawang Ilegal

Patroli Laut Bea Cukai kembali menuai prestasi dalam memberantas dan menggagalkan upaya penyelundupan melalui laut dalam Operasi Gerhana yang kini memasuki tahap ketiga. Patroli Laut Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 55 ton bawang merah ilegal yang dibawa oleh KM Bidara GT.60 berbendera Indonesia. Patroli Laut Bea Cukai Kapal BC 8006 mendeteksi keberadaan KM Bidara GT.60 yang diduga membawa barang impor ilegal di perairan Kuala Air Masin, Aceh Tamiang pada Rabu (29/06).



30/06

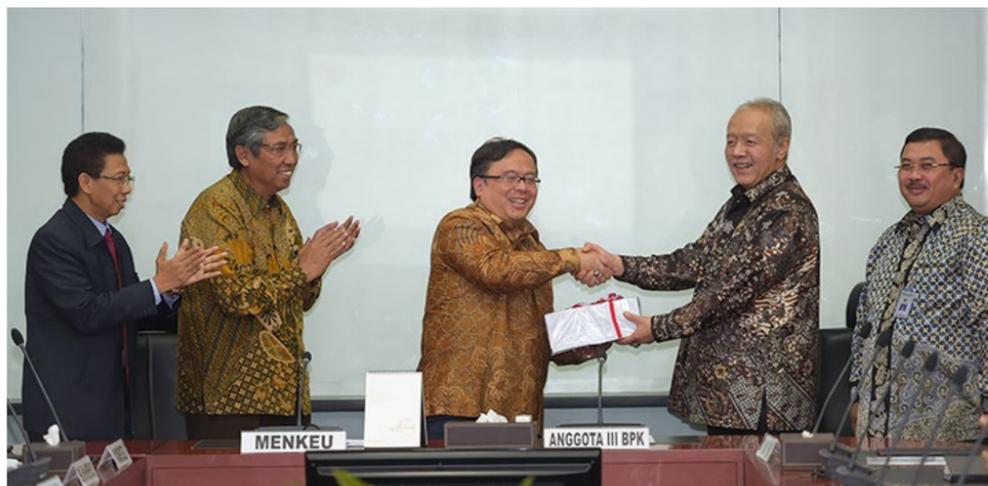
Teks DJBC

Foto DJBC

Pemerintah Hibahkan Lebih Dari 21 Ribu Kilogram Daging Sapi

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menghibahkan 21.847,22 kilogram daging sapi asal Australia pada Kamis (30/06). Daging ini akan diberikan kepada fakir miskin di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Daging ini merupakan hasil tegahan BC Tanjung Priok pada akhir Juni lalu.

- 2-5/08 Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) di Bali
- 2/08 Pre-marketing Sukuk Tabungan di Bandung
- 4/08 Pre-marketing Sukuk Tabungan di Semarang
- 5/08 Concluding Speech - Workshop Kemenkeu-AIPEG, Financing Growth and Infrastructure Development di Hotel Sofitel
- 5/08 SUN Goes to Campus di Universitas Negeri Gorontalo
- 9/08 Launcing LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) di Mezzanine
- 10/09 Pembicara Panel, 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 dengan topik "Robust Fiscal Policies to Achieve Indonesia Geothermal Development Target" di Cendrawasih Hall, JCC
- 11/09 Closing Meeting - IMF Staff Visit di RR Kepala BKF
- 15/09 Penyampaian RUU APBN 2017 beserta Nota Keuangan ke DPR
- 19/09 Sosialisasi Umum Pemda Jatim di Universitas Nusa Cendana Kupang
- 23/09 Preparation HLPD dan EPD di Canberra



30/06

Menkeu Terima Laporan Hasil Pemeriksaan LKBUN 2015

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015, dari Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Menteri Keuangan, Gedung Juanda I lantai 3, Kementerian Keuangan pada Kamis, (30/06). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tugas BUN, Menkeu selaku BUN merupakan entitas pelaporan juga wajib menyusun dan menyajikan LKBUN.

18/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Komisi XI DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2017

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggelar rapat kerja terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada Senin (18/07) di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja tersebut disepakati empat asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2017. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati di kisaran 5,2 persen hingga 5,6 persen. Kedua, asumsi inflasi disepakati di kisaran 3 persen hingga 5 persen. Ketiga, asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan disepakati di kisaran 5 persen hingga 6 persen. Keempat, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati di kisaran Rp13.300 hingga Rp13.600 per dolar AS.



01/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Presiden Resmi Canangkan Program Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan Program Pengampunan Pajak pada Jumat (01/07). Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa lalu (28/06). Presiden menyebut program ini adalah sebuah langkah besar serta terobosan untuk menyelesaikan persoalan perpajakan.



Sebuah bus penghubung terparkir di halaman Bandara Sultan Baabullah, Ternate. Dalam APBN-P, peningkatan dana ke daerah dilakukan dengan tujuan pemerataan pembangunan.

Foto
Pilar Wirotama

APBN-P 2016: Mengawal Kredibilitas Fiskal

Ada semangat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam postur APBN Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga (K/L). Kredibilitas fiskal tercermin dalam penyusunan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi ekonomi makro yang realistis, tapi tetap optimistis.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/6), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan komposisi APBN-P 2016 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR akhir Juni. Asumsi-asumsi ekonomi

makro adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 4 persen, dan nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.500/USD. Selanjutnya, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan rata-rata 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata USD40/barel, *lifting* minyak rata-rata 820 ribu barel/hari, dan *lifting* gas rata-rata 1.150 ribu barel setara minyak/hari.

Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta Wijaya mengungkapkan bahwa penurunan harga minyak dunia memberikan dampak yang cukup berat terhadap postur anggaran negara. Menurut Kunta, dari Januari hingga saat ini, rata-rata harga minyak hanya bergerak di kisaran USD35/barel. Di samping harganya yang rendah, penerimaan



Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang APBN-P 2016. Posturnya dinilai realistis, tapi tetap optimistis.

Foto Muhammad Fath

dari sektor minyak juga menghadapi tantangan kondisi sumur-sumur yang sudah tua, sehingga mempengaruhi tercapainya *lifting* harian.

Dalam menggerakkan ekonomi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. “Utamanya dengan menjaga belanja modal infrastruktur dan belanja barang pemerintah,” kata Kunta yang ditemui Media Keuangan di kantornya, Kamis (30/6). Dia melihat investasi swasta juga berpotensi untuk turut mendorong pertumbuhan. “Kami berharap dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak bisa mendorong investasi swasta, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi,” ujarnya lagi. Secara keseluruhan, Kunta mengungkapkan bahwa postur APBN-P sudah cukup realistis. Asumsi pertumbuhan 5,2 persen menunjukkan optimisme pemerintah dan DPR terhadap perekonomian sepanjang paruh kedua 2016.

Untuk memenuhi asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah dipandang perlu melakukan kerja keras, khususnya terkait dengan peningkatan sisi permintaan. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Ario Pratomo, Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Menurut Wahyu, kondisi perekonomian global yang masih stagnan akan menjadi tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen.

Wahyu mengapresiasi belanja pemerintah sudah lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pemerintah dipandang telah berkomitmen dan

fokus kepada belanja-belanja yang produktif. Hasilnya terlihat di daerah melalui berjalannya sejumlah proyek infrastruktur yang menggunakan belanja pemerintah pusat. “Hanya saja untuk belanja-belanja di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa melalui dana desa masih belum berjalan secara optimal,” kata Wahyu. Dari sisi penawaran, perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan juga dinilai belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penurunan biaya produksi. Oleh karena itu, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat segera memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Pokok-pokok perubahan

Dalam postur APBN-P 2016, target pendapatan negara sebesar Rp1.786,2 triliun. Angka ini turun sebesar Rp36,3 triliun dari APBN. Penurunan utamanya berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas), baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Penerimaan

PPh Migas turun sekitar Rp7,5 triliun, sedangkan PNBP-nya turun sekitar Rp28,8 triliun,” kata Menkeu.

Penerimaan perpajakan masih akan menjadi tulang punggung pendapatan negara. Menurut Menkeu, penerimaan perpajakan dalam APBN-P telah memperhitungkan estimasi penerimaan dari implementasi UU Tax Amnesty. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1539,2 triliun. Sementara pada PNBP, rendahnya harga minyak mengakibatkan penerimaan turun sekitar Rp9,9 triliun. “Secara garis besar, PNBP turun Rp28,8 triliun atau menjadi Rp245,1 triliun dari sebelumnya sebesar Rp273,8 triliun pada APBN,” tutur Menkeu.

Pada sisi belanja negara juga terjadi penurunan, yaitu sebesar Rp12,8 triliun dibandingkan belanja pada APBN. Pada anggaran perubahan, alokasi belanja total menjadi sebesar Rp2.082,9 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran naik dari Rp273,2 triliun menjadi Rp296,7 triliun. “Defisit naik sekitar Rp23,5 triliun atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto,” ujar Menkeu. Kenaikan defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri yang mengalami kenaikan dari Rp272,8 triliun menjadi Rp299,3 triliun.

Secara total, belanja pemerintah pusat turun sebesar Rp18,9 triliun menjadi Rp1306,7 triliun dalam APBN-P. Belanja K/L, yang merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat, mengalami penurunan dengan kebijakan efisiensi belanja operasional sebesar Rp16,3 triliun. Belanja K/L dianggarkan sebesar Rp767 triliun. Pemerintah memastikan bahwa pemotongan belanja ini hampir tidak menyentuh belanja infrastruktur. “Bahkan di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun penghematan dilakukan bukan dengan memotong atau menunda proyek infrastruktur, tetapi lebih kepada sisa lelang,” kata Menkeu.

Belanja mendesak

Di lain sisi, pada APBN-P terdapat juga kebutuhan belanja mendesak, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran. Yang termasuk dalam belanja K/L mendesak antara lain adalah belanja pertahanan dan keamanan. Kementerian Pertahanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp9,3 triliun menjadi Rp108,7 triliun. Menurut Menkeu, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk penanganan kasus terorisme dan narkoba.

Belanja mendesak juga digunakan untuk perbaikan fasilitas lembaga pemasyarakatan yang berada dalam anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games, postur APBN-P juga mengakomodasi tambahan belanja. “Tapi kenaikan ini tidak mengurangi belanja ekonomi. Belanja ekonomi terutama yang didorong belanja infrastruktur tetap merupakan belanja prioritas. Itu yang ingin saya tegaskan,” ujar Menkeu.

Dana transfer ke daerah dan dana desa

Kredibilitas pengelolaan fiskal juga tercermin dari keputusan pemerintah dan DPR untuk memberikan anggaran transfer ke daerah yang lebih besar dibandingkan belanja K/L. Hal ini baru pertama kalinya dilakukan

sepanjang sejarah. Dengan alokasi anggaran yang besar ke daerah, maka sumber pertumbuhan akan sangat ditopang dari realisasi belanja pemerintah daerah. Dalam postur APBN-P, belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp776,3 triliun, sedangkan belanja K/L tadi besarnya adalah Rp767,8 triliun.

Perubahan dana transfer ke daerah terdiri atas kenaikan dana bagi hasil, yaitu dari Rp106,1 triliun menjadi Rp109,08 triliun pada APBN-P. Sementara anggaran dana transfer khusus meningkat dari Rp208,9 triliun menjadi Rp211 triliun. Peningkatan ini terutama karena adanya realokasi dan tambahan dana alokasi khusus fisik untuk mendukung produktivitas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Selain itu, terdapat dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Dana yang disalurkan akan diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.

Penambahan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yang salah satunya mencanangkan pembangunan dari daerah. “Dana transfer ke daerah yang lebih besar dari belanja K/L dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerataan pembangunan antarwilayah diharapkan terjadi,” ujar Kunta.

Pembiayaan

Pada APBN-P 2016, defisit fiskal melebar dari 2,15 persen pada APBN menjadi 2,35 persen pada APBN-P. Namun demikian, angka

kesepakatan ini sebetulnya masih lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN-P sebesar 2,48 persen.

Untuk menutup defisit, pemerintah berencana menaikkan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp26,5 triliun. Pemerintah juga akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp19 triliun. Melalui penerbitan Surat Berharga Negara, pemerintah berharap dapat mengumpulkan dana Rp37,6 triliun.

Selain itu, di dalam APBN-P 2016 juga disepakati beberapa kebijakan yang strategis terkait pembiayaan anggaran. Salah satunya adalah keinginan pemerintah melanjutkan investasi melalui BUMN, penyediaan dana untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur, serta mendukung sustainabilitas program BPJS Kesehatan.

Anggaran mengikuti program

Presiden Jokowi berharap pengelolaan anggaran ke depan dapat menggunakan konsep *money follow program*. Menurut Juru Bicara Kemenkeu Luky Alfirman, instruksi Presiden Jokowi sangat tepat, baik secara waktu peluncuran maupun substansinya. Salah satu instruksi Presiden, kata Luky, adalah tidak diperlukan membuat program terlalu banyak. Alokasi belanja pada setiap direktorat dalam sebuah kementerian misalnya, tidak perlu semuanya mendapat jumlah yang sama. “Kita harus lihat belanja mana yang prioritas dan fokus ke sana. Cukup sedikit program, tapi fokus dan itu kita kerjakan secara benar,” ujar Luky.

Pada level pelaksanaan, K/L diharapkan berani menetapkan program-program yang prioritas dan mengalokasikan anggaran secara terfokus pada program-program tersebut. “Nanti pada tahun berikutnya kita tentukan lagi fokus ke mana. Apa program yang akan dijadikan prioritas,” kata Luky.

Dalam sudut pandang pengamat, Wahyu berharap instruksi *money follow functions* bukan hanya berlaku di pusat, melainkan juga di daerah. Menurut Wahyu, sebenarnya dalam penyusunan anggaran dalam program-program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk memberikan capaian-capaian yang dihasilkan. “Untuk itu, presiden perlu menginstruksikan agar belanja yang tidak produktif serta belanja yang *overlapping* dikoordinasikan kembali agar efisiensi anggaran dapat terlaksana,” kata dia.

Teks Dwinanda Ardhi

APBN-P 2016: Jaga Stabilitas Ekonomi, Capai Target Pembangunan

Hingga triwulan I tahun 2016, perlemahan ekonomi global masih berlanjut. Hal ini berdampak signifikan bagi kinerja perekonomian domestik. Akibatnya, terjadi beberapa perubahan, baik dari sisi asumsi dasar makro, maupun perubahan *baseline* akibat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan kebijakan terkini pemerintah yang terkait belanja prioritas dan subsidi tepat sasaran.

Terpengaruhnya fiskal negara dapat terlihat dari turunnya pendapatan negara dan meningkatnya belanja negara akibat subsidi dan bunga utang yang harus dibayarkan. Untuk itu, demi menjaga perekonomian tetap stabil, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal melalui penetapan APBN-P 2016. Hal ini juga dilakukan agar defisit anggaran terjaga di kisaran 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Asumsi Dasar Makro



Pertumbuhan
Ekonomi (%)

5,3
5,2



Inflasi
(%)

4,7
4,0



Nilai Tukar
(IDR/USD)

13.900
13.500



Tingkat Suku Bunga
SPN 3 Bulan (%)

5,5 (APBN)
5,5 (APBN-P)



Harga
Minyak Mentah
(USD/Barel)

50
40



Lifting Minyak
Bumi
(Ribu Barel/Hari)

830
820



Lifting Gas Bumi
(Ribu Barel setara
Minyak/Hari)

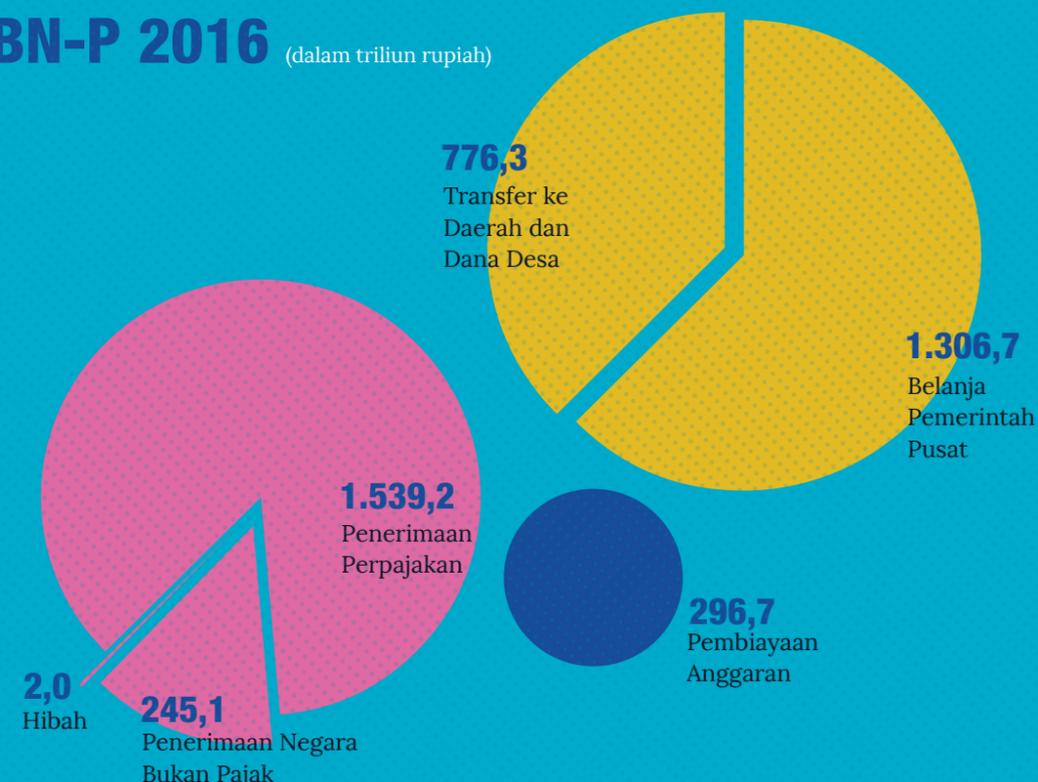
1.155 (APBN)
1.150 (APBN-P)

POSTUR APBN-P 2016 (dalam triliun rupiah)

Pendapatan Negara dan Hibah
1.786,2

Belanja Negara
2.082,9

Pembiayaan Anggaran
296,7



Langkah-Langkah Prioritas Pemerintah dalam APBN-P 2016

Pendapatan Negara

- Pencapaian target perpajakan melalui pengampunan pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak
- Optimalisasi kepabeanan dan cukai
- Penyempurnaan regulasi perpajakan
- Pembenahan administrasi dan IT perpajakan
- Pengembangan SDM dalam mendukung tugas perpajakan

Belanja Negara

- Pengehematan anggaran belanja pemerintah untuk kegiatan operasional dan kurang produktif
- Mendorong belanja subsidi yang lebih tepat sasaran

Transfer ke Daerah

- Penambahan anggaran dana bagi hasil dan anggaran dana transfer khusus dalam rangka memperkuat program pembangunan Indonesia dari pinggiran.
- Terdapat tambahan untuk Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi.

Pembiayaan Anggaran

- Optimalisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
- Pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- Melanjutkan investasi melalui BUMN
- Penyediaan dana untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur
- Mendukung sustainabilitas program BPJS Kesehatan

Peningkatan Dana Infrastruktur untuk Daerah

Pertama kalinya dalam riwayat anggaran, dana untuk daerah lebih tinggi. Pemerintah bangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk negeri.

Pekan terakhir Juni lalu menjadi detik-detik yang paling menegangkan bagi pemerintah. Sejumlah agenda rapat pembahasan RUU perubahan atas UU APBN 2016 dengan anggota DPR begitu ketat terjadwal sejak pagi hingga pagi keesokan harinya. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada rapat paripurna DPR Selasa (28/6) lalu, RUU Perubahan APBN 2016 disahkan.

Dalam APBN Perubahan 2016, untuk kali pertama sepanjang sejarah, alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dibandingkan belanja kementerian/lembaga (K/L). Tercatat, alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada APBN-P 2016 mencapai Rp776,3 triliun atau meningkat 0,79 persen dari pagu APBN 2016 sebesar Rp770,2 triliun. Sementara itu, belanja K/L mengalami penurunan dari Rp784,1 triliun (APBN 2016) menjadi Rp767,8 triliun (APBN-P 2016).

Menurut Boediarso Teguh Widodo, Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada prinsipnya kebijakan ini diambil untuk mendukung implementasi Nawacita. “Salah satu visi pemerintahan Joko Widodo ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah. Pembangunan ini tidak mudah mengingat tidak meratanya sebaran daerah dan antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alokasi dana yang besar dalam mencapai sasaran pembangunan,” katanya.

Kebijakan ini juga diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Esensi desentralisasi fiskal ini, lanjut Boediarso, menitikberatkan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah, transfer ke daerah dan dana desa bertujuan mendukung pembangunan daerah yang lebih tinggi dan inklusif.

Guna memastikan pelaksanaan transfer ke daerah berjalan dengan baik, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PML.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Terkait kebijakan transfer ke daerah, pemerintah menyiapkan sejumlah perbaikan kebijakan.

Pertama, pemerintah meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sebesar Rp729,3 triliun atau meningkat Rp6,1 triliun dibandingkan APBN 2016. Dalam kebijakan ini, pemerintah melakukan optimalisasi penggunaan sisa Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan dari Dana Reboisasi. Optimalisasi ini dilakukan tidak hanya melalui kegiatan reboisasi, tetapi

juga pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta beberapa kegiatan lain terkait rehabilitasi hutan.

Kedua, pemerintah melakukan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan menganggarkan Rp109,1 triliun atau meningkat Rp2,9 triliun dibandingkan APBN 2016. Peningkatan alokasi ini bertujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan maupun penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik. Pemerintah juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dengan meniadakan kewajiban dana pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi.

Ketiga, pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan menetapkan anggaran sebesar Rp1,88 triliun atau naik sebesar Rp1,05 triliun (APBN-P 2016). Dalam alokasi tersebut, Provinsi Papua menerima tambahan sebesar Rp787,5 miliar sehingga alokasi menjadi Rp1,99 triliun. Sedangkan Provinsi Papua Barat menerima tambahan sebesar Rp262,5 miliar sehingga alokasi menjadi Rp862,5 miliar. Adapun pembangunan diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.

Keempat, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah telah meningkatkan alokasi dana desa hingga 6 persen dari dan di luar transfer ke daerah. Pada tahun 2016, pemerintah menganggarkan dana desa menjadi Rp46,9 triliun atau 6,4 persen dari transfer ke daerah sehingga rata-rata nasional setiap desa akan menerima Rp628 juta.

Sesuai *Road Map* Dana Desa 2015-2019, tahun depan alokasi dana desa direncanakan mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah. Dengan besaran alokasi tersebut, maka pada saat itu rata-rata setiap desa akan memperoleh dana desa sekitar Rp1 miliar.

Tahun 2015 lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23 persen dari transfer ke daerah kepada sekitar 74.754 desa melalui APBD kabupaten/kota. Dengan kata lain, rata-rata setiap desa menerima dana sebesar Rp280 juta tahun lalu. Meskipun demikian, Boediarso menjelaskan bahwa masih terdapat dana yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

“Berdasarkan laporan yang telah kami terima dari 411 daerah, masih terdapat sisa dana desa yang mengendap di RKUD sebesar Rp194,93 miliar. Konsekuensinya, bagi daerah yang masih mengendapkan dana desa di RKUD, maka penyaluran



Visi konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain harus menjadi jiwa dari masing-masing pemerintah daerah. Bagaimana memahami perspektif connecting ini.

Foto Agung Ardhiyanto

tahap I dana desa tahun 2016 ditunda sebesar dana yang mengendap. Dana akan disalurkan setelah daerah menyalurkan sisa dana ke RKD,” jelasnya.

Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa 90,39 persen dari dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sisanya sebesar 9,61 persen digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan belanja lainnya.

Terakhir, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator, antara lain kesehatan keuangan daerah, hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Membangun konektivitas

Ekonom Universitas Andalas, Hefrizal Handra mengungkapkan bahwa lebih besarnya dana transfer ke daerah dibanding belanja K/L memperlihatkan berlanjutnya komitmen pemerintah dan DPR terhadap desentralisasi dan pembangunan pedesaan. Namun demikian, Hefrizal menyatakan bahwa pilihan kebijakan ini memiliki konsekuensi yang berat.

“Tidak mudah melakukan pengurangan belanja K/L bersamaan dengan peningkatan kebutuhan belanja Pemerintah Pusat, terutama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur nasional. Dalam kondisi target pendapatan yang mengalami tantangan berat di tengah tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian, Pemerintah justru meningkatkan dana transfer ke daerah dan dana desa,” ungkapnya.

Hefrizal memandang tujuan pemerintah untuk membangun dari pinggiran sangat baik karena memperlihatkan komitmen untuk pemerataan pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak kalangan yang menuduh stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh ketersediaan infrastuktur yang tidak memadai untuk memfasilitasi investasi.

“Namun upaya untuk menyelesaikan *infrastructure gap* ini tentu tidak boleh melupakan kebutuhan Negara untuk menyediakan layanan publik. Ini juga sangat penting untuk pembangunan manusia, yaitu bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

Senada dengan Hefrizal, ekonom Universitas

Paramadina, Firmanzah juga menyoroti masalah infrastruktur dan konektivitas yang mengaitkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik level nasional, provinsi, maupun kabupaten. Konektivitas ini bagi Firmanzah menentukan apakah aktivitas ekonomi bergerak atau tidak.

“Visi konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain harus menjadi jiwa dari masing-masing pemerintah daerah. Bagaimana memahami perspektif *connecting* ini. Jangan sampai pemda beranggapan ini anggaran saya untuk membangun wilayah saya saja. Membangun wilayah penting tapi jangan lupa berkoordinasi dengan kabupaten sebelah, walikota sebelah, provinsi sebelah,” ujarnya.

Firmanzah juga menyatakan pentingnya *policy design* yang menciptakan lapangan kerja karena menghasilkan efek bola salju. Melalui perluasan lapangan kerja, maka dapat mengentaskan kemiskinan, mencegah urbanisasi, mencegah penumpukan mobilisasi orang desa datang ke kota besar. “Paling tidak memberikan ruang kota besar untuk sedikit bernafas untuk menata dirinya sebelum arus dari desa masuk ke perkotaan untuk mencari kerja.”

Melibatkan banyak pihak

Hefrizal maupun Firmanzah sependapat bahwa dalam transfer ke daerah dan dana desa, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) memiliki peran penting dalam formulasi alokasi. Sementara Kementerian lain, diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Desa berperan dalam proses implementasi di daerah. Lalu, pemerintah daerah sebagai pemerintah otonom terendah juga berperan mengatur penggunaannya dalam APBDesa sesuai aturan yang berlaku.

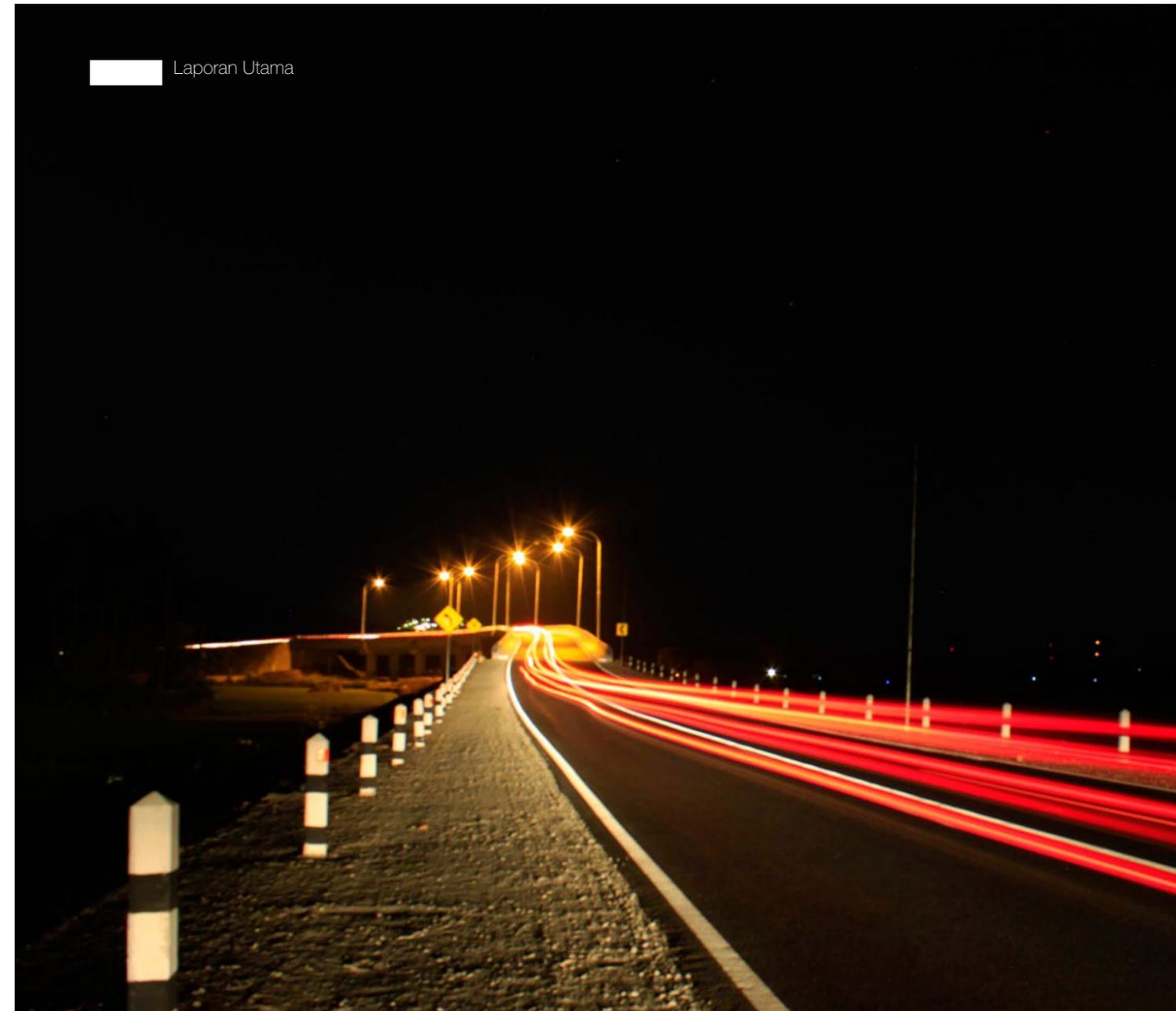
Hefrizal mengatakan bahwa Kementerian Keuangan berperan penting dalam mewujudkan formulasi kebijakan yang transparan dan akuntabel. “Setiap rupiah alokasi dana transfer ke daerah harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah pentingnya ialah data yang digunakan dalam proses formulasi alokasi harus valid dan bersumber dari institusi yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hefrizal.

Disisi lain, Firmanzah memaparkan bahwa hal terpenting ialah membuat proses pembangunan di daerah tidak eksklusif, tetapi melibatkan masyarakat lokal. Disinilah, Firmanzah melihat pentingnya peran pemerintah daerah untuk mendampingi masyarakat lokal ketika bernegosiasi dengan para investor, baik investor dalam maupun luar negeri. “Itu potret pembangunan yang memanusiakan, investasi yang memanusiakan”.

Firmanzah juga menyarankan untuk melibatkan para akademisi di masing-masing daerah sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan. “Teman-teman di kampus-kampus di daerah bisa menjadi pendamping agar penyerapan anggarannya baik dari sisi kuantitas dan positif dari sisi kualitas. Agar Rp776 triliun bisa berdaya guna, bermanfaat dalam waktu yang cepat,” tuturnya.

Teks lin Kurniati

Laporan Utama



Jalan tol.

Foto
Adhi Kurniawan

Suntikan Modal Negara Bagi Program Kesejahteraan

Tak dapat dipungkiri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) berperan besar dalam menyediakan akses barang dan jasa bagi masyarakat. Penguatan BUMN/BLU yang strategis dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Sebab itu, pada APBN-P 2016 pemerintah memberikan injeksi modal atau investasi pada sejumlah BUMN/BLU yang memiliki urgensi tinggi, seperti Badan Pemberi Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

PMN pada BPJS Kesehatan

Pada APBN-P 2016 BPJS Kesehatan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) karena masih adanya defisit anggaran. Menurut Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, sejak awal program BPJS Kesehatan dilaksanakan, sudah ada ketidakseimbangan rasio (*mismatch*) antara iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS dengan pengeluaran operasional dan beban jaminan kesehatan yang dibayar. "Bila *gap* ini dibiarkan maka akan mengganggu pelayanan publik di bidang kesehatan", kata Askolani.

Dijelaskan oleh Askolani lebih lanjut, jumlah peserta BPJS Kesehatan terus meningkat setiap tahun. Saat ini peserta BPS Kesehatan tercatat lebih dari 165 juta orang. Meski idealnya pemasukan lebih besar dari pengeluaran, namun kenyataannya hingga saat ini pendapatan BPJS Kesehatan tidak mencukupi biaya layanan kesehatan yang diberikan. "Ke depan pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar *gap* yang ada akan semakin mengecil. Selain dengan meningkatkan sumber penerimaan melalui beragam kebijakan, juga dengan mengefisienkan belanja operasional tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Askolani.

Dana talangan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ini bukan hanya akan digunakan untuk menutupi *mismatch* pada neraca keuangan BPJS Kesehatan, namun juga untuk menjaga likuiditas dan kelancaran arus kas. Sesuai peraturan pemerintah, ada tiga pilihan langkah yang dapat diambil untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) yaitu mengurangi manfaat, menyesuaikan besaran iuran, atau mengalokasikan dana tambahan dari APBN.

Pilihan mengurangi manfaat tidak dapat diambil dengan alasan kemanusiaan. Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS per April 2016 sesuai Perpres RI Nomor 19 Tahun 2016. Namun Perpres tersebut kemudian direvisi sehingga yang mengalami kenaikan hanya iuran kelas I dan II, sementara iuran kelas III tetap sebesar Rp25.500 sehingga masih ada kekurangan biaya. Suntikan dana PMN ini diharapkan mampu menyeimbangkan neraca keuangan BPJS ini secara keseluruhan.

Investasi Pemerintah pada LMAN

Tambahan dana juga diberikan pada BLU LMAN sebesar Rp16 triliun dalam bentuk investasi pemerintah. Inisiatif ini dilakukan mengingat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Utama LMAN, Rahayu Puspasari, kendala utama dalam pembangunan adalah penyediaan lahan, baik terkait pembebasan, pembayaran, maupun penganggaran. BLU LMAN yang berada di bawah Kementerian Keuangan akan memegang peranan sebagai bank tanah (*land bank*) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dipaparkan Rahayu lebih lanjut, usulan dan proses kebutuhan lahan akan tetap dilakukan oleh

Kementerian atau Lembaga (K/L). Namun kedepannya anggaran pengadaan lahannya akan dikelola oleh LMAN. Penggunaan dana investasi pemerintah pada APBN-P 2016 akan digunakan khusus pengadaan lahan jalan tol khusus di tahun ini, yakni Trans Sumatra, Trans Jawa, Non Trans Jawa, dan Jabodetabek," ungkap Rahayu.

Investasi pemerintah ini diharapkan akan mempercepat peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Dengan begitu, investasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat melalui dampak berganda (*multiplier effects*) yang ditimbulkan. "Dengan sendirinya waktu tempuh menjadi lebih cepat, lapangan kerja akan tercipta, biaya transportasi dapat ditekan, sehingga harga jual barang juga menjadi lebih rendah", jelas Rahayu. Selain itu, bila proyek prioritas telah rampung, akan tumbuh titik-titik wilayah ekonomi baru dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ditanya mengenai kecukupan dana, Rahayu mengatakan sebenarnya anggaran pembebasan lahan keempat tol tersebut sebenarnya masih jauh dari total kebutuhan sekitar Rp44,6 triliun. LMAN sendiri juga tengah menyiapkan instrumen-instrumen pembiayaan lain agar tidak bergantung pada APBN. "Saya juga berharap semua *stakeholders* bisa bersinergi. Ini kan pekerjaan bersama. Kalau semua pihak kompak, masyarakat Indonesia bisa segera punya infrastrur yang memadai," tutup Rahayu.

Teks Irma Kesuma

APBN-P 2016 Konsisten dengan Nawacita

Askolani.

Foto
Bagus Wijaya



Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 (RUU APBN-P 2016). Simak pembahasan lebih lanjut mengenai APBN-P 2016 bersama Direktur Jenderal Anggaran, Askolani.

Bagaimana Anda memandang Postur APBN-P 2016?

Dengan melihat situasi ekonomi saat ini, kami melihat apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN-P Tahun 2016 sudah cukup ideal. Setelah melakukan pembahasan dengan Dewan Pertimbangan Rakyat, akhirnya disepakati defisit menjadi 2,35 persen dari PDB. Angka ini lebih kecil dari proposal awal yang diajukan ke DPR, yaitu 2,48 persen. Pertimbangan yang dilakukan yaitu hasil *review* penerimaan pada beberapa bulan berjalan di tahun 2016, *review* asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN-P 2016, dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan di sisi belanja.

Posisi defisit 2,35 persen ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi defisit tahun 2015 sekitar 2,5 persen. Dengan posisi defisit ini, kita tetap bisa menjaga sistem stabilitas pembangunan tanpa harus memotong belanja prioritas di tahun 2016. Kita harapkan APBN itu tetap bisa menjadi stimulus ekonomi di tahun 2016 ini pada saat ekonomi agak melambat baik di nasional maupun global.

Apa dampak kesepakatan anggaran defisit tersebut bagi pembangunan?

Turunnya anggaran defisit dari 2,48 persen menjadi 2,35 persen dari PDB memberikan sinyal positif bahwa pemerintah dan DPR berhati-hati menetapkan APBN-P 2016. Dengan itu, diharapkan dapat terwujud sustainabilitas fiskal dan sustainabilitas pembangunan. Di samping itu, langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah sangat membantu untuk mengarahkan belanja APBN agar menjadi lebih optimal.

Pada APBN-P 2016 juga dilakukan pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Bagaimana respon K/L terhadap kebijakan ini?

Pemotongan belanja K/L tidak hanya dilakukan sekali ini. Pada periode-periode sebelumnya, pemerintah selalu konsisten mengevaluasi belanja K/L dari yang ditetapkan APBN. Dari evaluasi itu kita bisa melihat bahwa pagu operasional untuk K/L itu terkadang masih berlebih, masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini kami lakukan evaluasi.

Selanjutnya, kebijakan ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo bahwa K/L harus menghemat belanja operasional. Presiden tidak ingin belanja K/L lebih banyak untuk belanja operasional yang manfaat ekonominya tidak maksimal, misalnya perjalanan dinas, rapat, konsinyering, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu tetap dibutuhkan oleh K/L untuk mendukung kinerjanya, namun harus dalam batas-batas yang wajar.

Apakah kebijakan ini cukup signifikan dalam menghemat APBN?

Berdasarkan evaluasi, kita melaporkan kepada Presiden bahwa belanja operasional K/L setiap tahunnya naik dengan signifikan. Presiden dan Wakil Presiden pun menetapkan bahwa kita, termasuk Kementerian Keuangan, harus melakukan penghematan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2015 kita bisa melakukan penghematan belanja K/L sampai Rp16 triliun, tahun 2014 bisa sampai Rp43 triliun. Maka, berdasarkan evaluasi tersebut Presiden mengatakan harus melakukan

penghematan sampai Rp50 triliun. Kebijakan ini sudah diatur oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Pertama kalinya dalam sejarah, anggaran Transfer ke Daerah lebih besar dari belanja K/L. Apa yang menjadi latar belakang hal ini?

Dana transfer ini akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten kota. Maka kita memberi dana lebih banyak ke APBD sesuai dengan pesan Presiden bahwa mereka diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. APBN-P ini mendapat dukungan Presiden karena memang dinilai konsisten dengan Nawacita dan konsisten dengan desentralisasi otonomi fiskal.

Jadi kita memperbaiki pola pembangunan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Selama ini pagu belanja K/L sudah dominan, padahal kenyataannya pagu belanja K/L ini ujung-ujungnya dialokasikan untuk pembangunan di kabupaten atau kota. Kelemahannya, pertanggungjawaban dana pembangunan ini ada di pusat. Nah kami menyadari ternyata pola ini kurang optimal untuk membangun pinggiran. Harusnya yang bertanggungjawab untuk itu adalah kabupaten atau kota, bukan pusat.

Apa harapan Anda terhadap implementasi APBN-P 2016?

Pertama, sesuai dengan tugas Kementerian Keuangan, kita berharap semoga perencanaan di sisi penerimaan benar-benar bisa dicapai. Kedua, sesuai dengan pesan Presiden, belanja diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif. Ketiga, Menteri Keuangan mengarahkan bagaimana fiskal kita lebih kredibel. Hal ini krusial bagi kita.

Kredibel diartikan level defisitnya berada dalam batas yang aman dan wajar. Kalaupun harus ada penyesuaian defisit, bisa dibiayai oleh komponen pembiayaan. Tentunya pembiayaannya bisa *sustainable*, jadi bisa berada pada batas-batas yang wajar. Hal tersebut merupakan usaha keras Menteri Keuangan setiap tahunnya untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Teks Pradany Hayyu

Kemenkeu Sosialisasikan Amnesti Pajak pada 2.700 Pengusaha Jatim



Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Amnesti Pajak (*tax amnesty*) pada lebih dari 2.700 pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar di Jawa Timur, Jum'at (15/7). Acara yang berlangsung di Grand City Surabaya ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam sambutannya, Joko Widodo menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini secara langsung akan diawasi Presiden beserta *task force* yang terdiri atas instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) dan intelijen. "Supaya tumbuh kepercayaan untuk membangun bangsa kita," katanya.

Presiden juga menyampaikan agar Warga Negara Indonesia dapat berpartisipasi dalam program amnesti

pajak. Tujuannya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi global. "Semua negara berebut investasi, uang, modal agar ada aliran dana masuk dengan berbagai kemudahan dan pelayanan terbaik. Hal ini juga yang dilakukan pemerintah dengan berbagai paket kebijakan ekonomi 1-12 dan akan terus kita buat lagi," ujarnya.

Partisipasi warga negara diharapkan dapat dilakukan dengan mengalihkan harta/kekayaan yang berada di luar negeri kembali ke tanah air atau dengan mendeklarasi harta yang berada di Indonesia. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen investasi jangka pendek seperti Reksadana, Surat Berharga Negara, maupun Obligasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Selain itu, pemerintah menyiapkan instrumen investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga menyiapkan instrumen investasi pada berbagai kebutuhan pangan yang saat ini porsi impornya masih besar, antara lain gula, jagung, buah, dan kedelai.

Presiden menekankan bahwa program Amnesti Pajak bukan semata-mata untuk Penerimaan Negara tetapi juga untuk memperkuat nilai tukar Rupiah. "Gubernur BI akan mengatur sehingga produk-produk Indonesia tetap kompetitif di pasaran luar negeri di tengah penguatan nilai tukar Rupiah," ungkapnya.

Tak hanya itu, Presiden juga menjamin kerahasiaan data dari Wajib Pajak yang sudah ikut amnesti pajak. "Kerahasiaannya dijamin. Yang ikut tidak dijadikan dasar untuk penyidikan dan penuntutan pidana. Data tersebut tidak akan diminta dan diberikan kepada siapapun. Yang membocorkan akan kena pidana maksimal lima tahun," tegas Presiden.

Teks Amelia Safitri

Menkeu Tanda Tangan Perjanjian dengan Bank Penerima Dana Repatriasi

Kementerian Keuangan melakukan kerja sama dengan empat bank persepsi yang ditunjuk untuk mengelola harta wajib pajak peserta amnesti pajak. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di sela acara Sosialisasi Pengampunan Pajak di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/07).

Empat bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA). Bank persepsi ini menjadi salah satu pintu masuk (*gateway*) investasi dari dana repatriasi aset wajib pajak dari luar negeri, selain manajer investasi dan perdagangan efek.

“Jadi ada tiga bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan satu bank swasta. (Mereka) Sebagai bank-bank penerima mandat tahap pertama

dari Menteri Keuangan (Menkeu) untuk bisa menerima dana hasil repatriasi,” jelas Menkeu sesaat sebelum penandatanganan.

Keempat bank ini merupakan bank persepsi tahap pertama yang ditunjuk pemerintah untuk menampung dana repatriasi pajak. Dalam waktu dekat, sejumlah bank lain juga akan ikut serta dalam mendukung kebijakan amnesti pajak.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro dengan empat Direktur Utama Bank Persepsi dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Para Direktur tersebut yakni Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja.

Sebagai informasi, rangkaian acara sosialisasi pengampunan pajak ini

diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani.

Saat membuka acara sosialisasi, Jusuf Kalla menegaskan, program amnesti pajak merupakan kesempatan langka yang harus dimanfaatkan oleh para wajib pajak, termasuk dari kalangan pengusaha. “*Tax amnesty* ini kesempatan yang jarang terjadi, mungkin tiga puluh tahun mendatang baru akan ada lagi, yang tidak pakai artinya sombong,” tegasnya.

Menurut rencana, sosialisasi dilakukan selama lima hari, yakni pada 21, 22, 25, 28 Juli dan 1 Agustus 2016. Apindo menargetkan, dalam sehari, sosialisasi dapat dihadiri oleh dua ribu peserta, yang berasal dari anggota perusahaan, pedagang, dan sejumlah asosiasi.

Teks Novita Asri H.



Foto
Dok. Biro KLI



Cara Mayor Edan Mengubah Batang

Foto
Anas Nur Huda

Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang, Jawa Tengah, dijuluki *edan* lantaran memilih pensiun dini dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2009 dan menjadi pengusaha di Papua. Pada tahun 2012, Yoyok merasa terpanggil dan memutuskan kembali untuk membangun kampung halamannya. Pilihan Yoyok untuk mencalonkan diri sebagai Bupati melalui jalur independen tak sia-sia. Dalam waktu kurang dari lima tahun, mantan intelijen ini berhasil mengubah Batang 180 derajat.

Apa yang terbayang di benak Anda saat terpilih menjadi Bupati Batang?

Sebelum menjadi bupati, saya berkeliling bertemu masyarakat. Saya sampaikan visi dan misi saya untuk mewujudkan birokrasi bersih dan ekonomi bangkit. Kemudian, saat dilantik menjadi bupati, hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana cara mengelola keuangan yang ada di Kabupaten Batang.

Ketika itu, saya pikir mengelola keuangan daerah akan mirip dengan dengan menjadi seorang manajer di perusahaan, bahkan semudah mengelola toko saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, apa yang saya hadapi berbanding terbalik. Mengelola keuangan daerah ternyata tidak mudah.

Tugas saya adalah sebagai perencana. Namun masih harus disesuaikan dengan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dinas-dinas terkait. Saya *kan* tidak pernah punya latar belakang birokrasi. Saya juga tidak punya latar belakang ilmu politik. Jadi memang 'buta' saat pertama kali memimpin. *Alhamdulillah* seiring berjalannya waktu saya bisa sambil belajar sambil bekerja. Sedikit demi sedikit saya bisa menemukan ritme yang pas di pemerintahan daerah.

Anda pernah menjadi purnawirawan. Apa hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda saat ini?



Oh jelas. Memimpin itu adalah sebuah seni. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti sangat berbeda. Kebetulan saya memiliki latar belakang militer. Gaya kepemimpinan saya bisa dikatakan sangat terpengaruh dengan gaya saya pada saat saya menjabat sebagai anggota TNI. Tetapi saya memang harus menyesuaikan diri. Lingkungan militer itu bedanya seperti antara telapak dan punggung tangan dengan birokrasi. Oleh karena itu, saya yang harus menyesuaikan diri dengan dunia birokrasi.

Rumah dinas Anda selalu terbuka 24 jam. Apa tujuannya?

Saya ingin lebih dekat dengan masyarakat. Masukan yang saya dapatkan justru paling banyak datang dari masyarakat, bukan dari teman-teman birokrat atau partai politik. Setelah sekian lama waktu berjalan, saya baru menemukan bahwa penjaga benteng demokrasi ini ternyata bukan di kalangan elit politiknya, melainkan di masyarakat.

Jadi, masyarakat saya libatkan secara penuh dari awal hingga akhir dalam jalannya pembangunan. Mulai

dari penganggaran, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi mengikutsertakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya biasa menggelar pertemuan *head to head* dengan masyarakat sebulan sekali dalam forum yang bebas. Sebab itu, pintu rumah saya terbuka 24 agar saya bisa mendengar langsung dari masyarakat.

Anda dikenal sangat serius memberantas korupsi. Apa yang Anda lakukan?

Sebetulnya pemberantasan korupsi ini tidak perlu terlalu digemborkan, melainkan harus langsung dilaksanakan. Hal ini bisa dimulai dari keterbukaan informasi. Harus ada transparansi kepada masyarakat dimana mereka memiliki hak untuk tahu. Disamping itu, saya juga membuat pakta integritas. Mental anti korupsi Sumber Daya Manusia (SDM) kita dan tentunya diri saya sendiri harus dijaga.

Saya bekerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang betul-betul berkomitmen untuk mengawasi setiap kemungkinan penyelewengan. Saya juga menggandeng universitas dan semua pihak untuk

menjaga birokrasi yang bersih. Ternyata akhirnya saya masih optimis bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang ingin maju dan banyak teman-teman yang bisa membantu. Kebaikan pasti akan berkumpul dengan kebaikan. Makanya setelah saya mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2015, ternyata banyak media yang ingin tahu lebih jauh mengenai Batang.

Bagaimana caranya agar masyarakat Batang dapat turut mengawasi?

Saya membentuk lembaga independen yang diwakili oleh beberapa teman-teman dari LSM di luar dari birokrasi, namanya Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, rendah luar biasa. Oleh karena itu, kita harus membuat jembatan agar mereka bisa mendekat. Jembatan itu saya buat namanya UPKP2. Jangan sampai jembatan ini terputus lagi.

Saat UPKP2 awal dibangun, birokrat saya mengatakan bahwa itu seperti inspektorat bayangan atau Badan Pemeriksa Keuangan gadungan. Tapi nyatanya sekarang masyarakat bukan saja *complain* masalah pelayanan atau pembangunan, bahkan mau cerai saja sampai datang ke UPKP2. *Insya Allah* wadah ini akan dijadikan percontohan. Beberapa waktu lalu Presiden sudah mengirimkan staf khususnya ke Batang. Kami menjadi sangat terbelalak.

Bagaimana Anda mengelola APBD sehingga Pendapatan Asli Daerah Batang meningkat begitu pesat? (Dari Rp67 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp186 miliar pada 2014)

Saya malu sebetulnya kalau bicara APBD. Kalau dibandingkan dengan kota-

kota besar, anggaran kami itu seperti bumi dan langit. Tapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Saya tidak boleh menyerah dan harus mencoba meningkatkan penghasilan daerah. APBD saya lebih kecil dari pajak reklamenya Walikota Risma di Surabaya atau Walikota Ridwan Kamil di Bandung. APBD Batang itu kalau dipake untuk operasional lurah satu kecamatan Gubernur DKI, Ahok di Jakarta saja sudah habis. Tapi enggak apa-apa karena memang kenyataannya seperti itu.

Awal saya bekerja sama dengan teman-teman birokrat saya ingin menerapkan sistem birokrat *entrepreneur*, yaitu bagaimana menggunakan APBD dengan menganut prinsip dan asas ekonomi. Tapi ternyata *enggak* berjalan karena pegawai kita ini *enggak* mengenal resiko. Mau anggaran habis atau tidak habis, benar atau tidak, tidak pernah ada yang dipecat. Toh aturan untuk pergantian jabatan juga super ketat, kecuali jika saya menabrak aturan dan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan. Sebab itu semua saya harus melakukan pembinaan.

Pembinaan itu tidak *ujug-ujug* secepat kilat bisa menyulap orang dari yang nilainya D langsung mendapat nilai A. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membina pelan-pelan, bukan dengan membinasakan karir mereka. Namun saya tetap berkonsentrasi untuk serius menggali semua potensi Batang, di samping tentunya melakukan efisiensi.

Ada cerita yang lucu di Batang. Uang yang bisa saya kembalikan lagi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita bukan dari sektor pajak atau sektor pendapatan tetapi dari efisiensi lelang. Saya yakin *enggak* terjadi di manapun. Jumlahnya miliaran. Hasil pengecekan

proyek yang enggak sesuai diminta untuk dikembalikan. Ini dahsyat.

Apa prioritas Anda dalam membangun Batang?

Membangun manusia. Tantangannya banyak karena watak dasar manusia itu *kan* ingin bebas, ingin mendapat keuntungan yang banyak, dan tidak mau diatur. Apalagi kalau dia sudah merasa nyaman. Saya harus melakukan segala cara untuk menjaga agar semua kegiatan tetap pada jalurnya yaitu untuk betul-betul mengabdikan kepada bangsa dan negara. *Alhamdulillah* semakin lama semakin banyak orang yang ikut barisan kami.

Pembenahan yang Anda lakukan tentu bukan tanpa gejolak, seperti apa Anda menyikapinya?

Saya menerapkan *reward and punishment* serta tarik-ulur. Saya harus tahu kapan saya menempatkan seseorang sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai bawahan, dan kapan saya harus bertindak saya sebagai komandan yang bisa menjustifikasi bahwa seseorang salah dan harus dihukum.

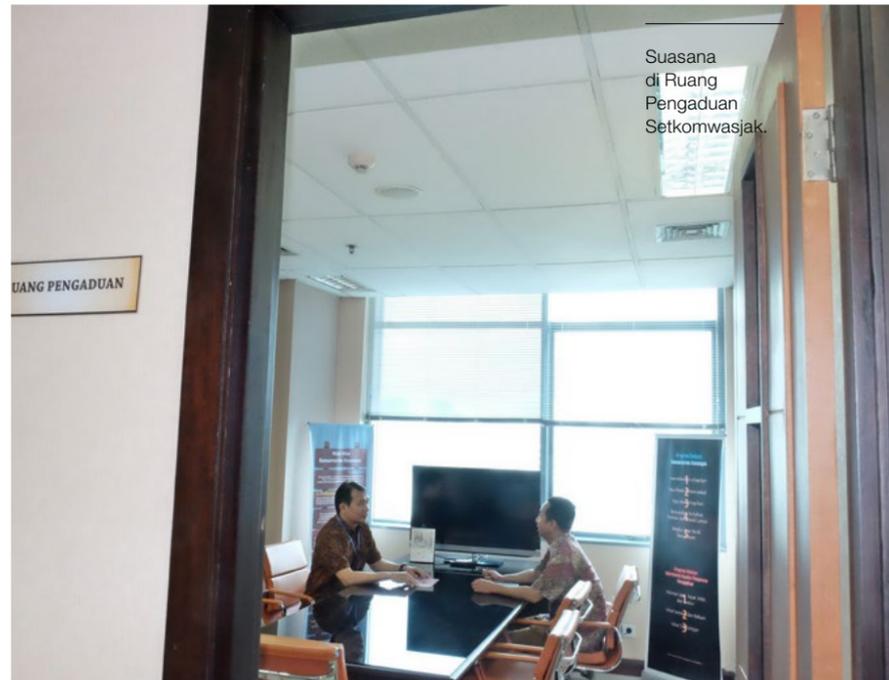
Apa mimpi Anda terhadap Batang kedepan?

Batang merupakan satu kota kecil di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Tidak banyak orang yang mengetahui dimana itu Batang. Mungkin yang dikenal hanya musik dangdut dan keangkeran hutan Alas Robannya saja. Saya berharap suatu saat orang akan mengenal Batang sebagai kota kecil yang berkembang sangat dahsyat karena ada investasi yang luar biasa. Selain itu juga karena tokoh masyarakatnya yang berbudaya dan menginspirasi Indonesia.

Teks Irma Kesuma

Meluruskan yang Bengkok, Memperkuat yang Lemah

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan



Pembangunan di negeri ini tak lepas dari penerimaan negara yang berasal dari perpajakan. Hal ini begitu penting sehingga Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Tugas utama Komwasjak adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Untuk menunjang kinerjanya, Komwasjak dibantu oleh Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Setkomwasjak) yang bernaung di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, Hana Sri Juni Kartika menjelaskan keunikan dan keistimewaan unit yang dipimpinnya dalam mendukung kinerja Menteri Keuangan. Saat menerima wawancara Media Keuangan, Hana mengungkapkan saat itu dirinya genap satu tahun menjabat sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan. Satu tahun yang dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja kepada *stakeholders*.

Bagaikan kacang dengan kulitnya, kedudukan Setkomwasjak tak terpisahkan dengan Komwasjak. Pembentukan Setkomwasjak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54 Tahun 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36 C juga menyebutkan pembentukan Komwasjak oleh Menteri Keuangan.

Meskipun telah dibentuk sejak 2008, namun Sekretaris Komwasjak saat itu dijabat oleh seorang pejabat pelaksana tugas (Plt). Pada tahun 2014, Puspita Wulandari (saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawas Perpajakan) ditunjuk sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan yang pertama. “Saya merupakan Sekretaris (Komwasjak) yang kedua,” ujar Hana sembari tersenyum. Komwasjak sendiri terdiri dari tujuh anggota, dua anggota *ex officio* adalah Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Lima anggota lain masih menunggu penunjukan Menteri Keuangan.

Kinerja utama

“Kami tidak hanya memberikan dukungan administrasi bagi Komwasjak, tapi juga dukungan teknis,” tegasnya. Tugas dan fungsi unit yang berlokasi di gedung Djuanda II lantai 14 Kompleks Kementerian Keuangan Pusat ini memang sangat kental dengan teknis perpajakan. Kinerja Setkomwasjak terbagi menjadi empat unit Eselon III. Diantaranya yaitu Bagian Umum, Bagian Pengaduan dan Verifikasi, Pengamatan dan Monitoring, serta Bagian Fasilitasi Analisa dan Konsultasi.

Meskipun kinerja Setkomwasjak terhitung efektif selama dua tahun, namun telah banyak capaian kinerja yang dilakukan. Hingga kini, tercatat ada 261 frekuensi pengaduan terkait pelayanan unit teknis perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). “Kami membuka saluran pengaduan wajib pajak dan *stakeholders* melalui layanan telepon, sms (*short message services*), surat, surat elektronik (*email*), dan *walk-in* (masyarakat datang langsung ke



Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, Hana Sri Juni Kartika.

Foto Bagus Wijaya

atas PMK No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan. Salah satu perubahan dalam peraturan baru ini yaitu anggota Komwasjak selama tiga tahun bisa ditunjuk kembali untuk satu periode ke depan. Jumlah anggota Komwasjak juga ditambah, semula lima menjadi tujuh orang anggota.

“Dengan adanya PMK No. 63 Tahun 2016 ini maka Setkomwasjak perlu mendapat penguatan dari sisi organisasi dan kelembagaan. Ini menjadi tantangan kami ke depan,” tegas Hana. Terkadang, tantangan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam bekerja. Begitu juga dengan tantangan yang dihadapi oleh Setkomwasjak. Dengan jumlah total pegawai sebanyak 42 orang, diperlukan strategi khusus agar seluruh kinerja Setkomwasjak dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, PMK No. 63 tahun 2016 membuat kewenangan Komwasjak bertambah. Sebelumnya, wewenang Komwasjak hanya mengawasi pelaksanaan administrasi perpajakan. Saat ini ditambah dengan mengawasi kebijakan perpajakan (*tax policy*). Setkomwasjak sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada Badan Kebijakan Fiskal sebagai perumus kebijakan di bidang perpajakan.

“Setkomwasjak sebenarnya berfungsi untuk meluruskan yang bengkok dan menguatkan yang lemah,” jelas Hana. Artinya, ketika Setkomwasjak menemukan suatu hal yang kurang tepat dalam administrasi atau kebijakan perpajakan, maka Setkomwasjak akan

membantu untuk memberikan saran dan masukan. Namun pihak yang diberi saran terkadang melakukan resistensi. Diakuinya, hal ini wajar karena siapapun pada dasarnya tidak ingin diawasi. Untuk itu, sangat diperlukan sosialisasi tugas dan wewenang Setkomwasjak kepada *stakeholders*.

Ke depan, Hana berharap Setkomwasjak bisa lebih memberikan dukungan teknis dan administratif yang andal kepada Komwasjak. “Wajah Komwasjak akan sangat dipengaruhi oleh keandalan kinerja Setkomwasjak,” tegasnya. Keberadaan Komwasjak dan Setkomwasjak tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mengurai hambatan yang dialami unit saat bertugas mengumpulkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang merambah ke instansi pemerintah, Setkomwasjak juga turun mengambil peran. Hana mengakui, kecanggihan teknologi membuat kinerja Setkomwasjak semakin mudah. Maka, Setkomwasjak pun mulai berbenah dengan melakukan penyempurnaan *website* komwasperpajakan.kemenkeu.go.id. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dalam pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat. Namun tidak semua lapisan masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Sistem manual pun masih tetap diberlakukan.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Bagus Wijaya

Juru Bicara Pertama

Bukan seorang ahli bukan pula praktisi komunikasi, namun cukup terlibat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Luky Alfirman menjadi sosok Juru Bicara Menteri Keuangan yang pertama kali diangkat sepanjang sejarah.

Ada yang berbeda pada Sosialisasi dan Training Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/07) lalu. Seorang pria mengenakan batik berwarna cerah tengah berdiri di depan sebuah mimbar. “*Tax amnesty* bukan semata-mata soal perpajakan. Kita punya tujuan yang lebih besar di sana, yaitu memajukan perekonomian Indonesia secara lebih *sustainable*,” tegasnya.

Dialah Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) sekaligus Juru Bicara (jubir) Kementerian Keuangan. Tak pernah terbersit sedikitpun di pikiran pria kelahiran Bandung 27 Maret 1970 ini bahwa dirinya dipercaya sebagai jubir. “Saya tidak pernah bermimpi jadi jubir, tapi mudah-mudahan pengalaman kerja sebelumnya dapat membantu saya menjadi jubir yang baik dan efektif.”

Titik balik

Awal tahun 1995 seolah menjadi titik balik kehidupan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung di Jakarta.

Lelaki yang sebelumnya sudah menjadi *management associates* pada salah satu bank swasta terkemuka ini mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan.

“Waktu itu (jurusan) teknik dibuka karena (instansi) Pajak sedang memulai program *automasi-komputerisasi*. Itulah salah satu angkatan yang paling banyak merekrut jurusan teknik,” ujar Luky. Setelah melewati proses seleksi selama enam bulan, anak pasangan Darman Jan Tamin dan Emminar ini diterima pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Hidup adalah sebuah pilihan. Mungkin ungkapan ini cukup menggambarkan kondisi Luky kala itu. Bungsu dari tiga bersaudara ini dihadapkan pada pilihan mempertahankan posisinya di bank atau mengabdikan sebagai abdi negara. Obsesi melanjutkan pendidikan tetapi keterbatasan biaya ternyata menjadi alasan kuat baginya memilih bekerja di instansi pengelola keuangan dan kekayaan negara ini.

Keputusannya memilih bekerja di Kementerian Keuangan berbuah manis. Beberapa waktu kemudian, Luky mendapatkan

kesempatan mengikuti ujian seleksi beasiswa. Dengan pertimbangan akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral, Luky memilih konsentrasi ekonomi pada University of Colorado in Boulder, Amerika Serikat.

Ujian terberat yang dirasakan Luky kala itu adalah pada saat ayahnya dipanggil Yang Maha Kuasa. “Saya ingat kata-kata beliau, ‘In shaa Allah papa ingin lihat kamu wisuda.’ Itu cukup memukul,” tuturnya. Demi menghapus perasaan duka, sebelum Luky berhasil meraih gelar Master of Arts in Economics tahun 2000, suami dari Astrid Rengganis Savitri ini bertekad untuk langsung melanjutkan ke jenjang S3.

“Sejak tahun kedua (kuliah S2) saya sudah mulai meng-*explore* mencari sumber pendanaan lain. Ternyata pihak universitas memberikan *scholarship* dalam bentuk *teaching assistant*. Saya melamar dan diterima. Akhirnya saya langsung dapat meneruskan S3 tanpa harus pulang. Istri saya juga coba cari *scholarship*, akhirnya dapat dari University of Colorado in Denver,” kenangnya.

Lucky Luky

Sekembalinya ke tanah air, Luky ditempatkan sebagai Kepala Subbagian di Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Organta) Sekretariat DJP. Menurut Luky, pada saat itu, DJP tengah melakukan modernisasi perpajakan melalui *tax reform* hingga terjadi perubahan yang sangat besar.

“Modernisasi adalah perubahan paradigma. Ada tiga pilar modernisasi: perubahan struktur organisasi, perubahan *business process* dan IT (*Information Technology*), serta perubahan SDM (Sumber Daya Manusia). Bagaimana meramu sistem yang baru (dengan) mengedepankan integritas, menjaga *good governance*, dan pada saat yang bersamaan kita tetap menjaga *performance*,” jelasnya.

Dua tahun berselang, Luky dipromosikan sebagai Kepala

Subdirektorat Potensi Perpajakan pada Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan, DJP. Selang satu tahun menjabat, Luky kembali ditarik pada bagian Organta dan dipercaya sebagai Kepala Bagian.

Kemudian pada 2008, Luky ditugaskan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Bila sebelumnya pekerjaan Luky lebih fokus membuat kebijakan, maka saat itu ia harus menghadapi wajib pajak secara langsung. Luky tidak hanya harus mengelola sisi eksternal dengan berhubungan dengan *stakeholders*, Luky juga harus mengelola sisi internal kantor, khususnya SDM.

Luky ditarik kembali ke kantor pusat tahun 2010. Salah satu hasil restrukturisasi organisasi ialah membentuk unit khusus yang menangani manajemen transformasi dan reformasi kelembagaan. Luky ditempatkan sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi di Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Rutinitas pekerjaan yang padat membuat hati Luky berkecamuk. Ia tak ingin terjebak pada kondisi itu selamanya. “Saya punya *passion* di bidang ekonomi, saya tidak mau kehilangan ilmu ekonomi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajar.” Berbekal pengalaman sebagai *teaching assistant*, Luky mendapat penawaran mengajar *public economics* untuk jenjang master dan doktor di Universitas Indonesia.

Sayangnya, ini tak berlangsung lama karena ia dipindahtugaskan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Luky diberi amanah sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF. Belum setahun menjabat, Lucky Luky, pada 2012 ia dipercaya sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF.

Selain terlibat merumuskan kebijakan ekonomi makro, Luky juga berperan dalam *Investor Relation Unit* (IRU). Luky *intens* mengadakan pertemuan dengan para analis maupun investor asing untuk memperbarui informasi tentang perkembangan ekonomi dan kebijakan

fiskal serta mempromosikan Indonesia sebagai negara berkembang yang layak investasi.

Di tempat ini pula Luky diberi tugas menyelenggarakan seminar ekonomi internasional tahunan BKF. Tantangan terberatnya, Luky ditugasi untuk menghadirkan pembicara pemenang nobel ekonomi (Nobel laureate), meski dengan terbatasnya anggaran.

Luky memulai dengan mencari cara menghubungi beberapa calon, di antaranya Prof. Joseph E. Stiglitz. Lalu, ia mendapatkan *contact* Hamid Rashid, murid Stiglitz yang bekerja di United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). Lantas, mereka bekerja sama membuat sebuah *event* di Bali, tetapi malangnya Stiglitz batal hadir karena alasan keluarga.

Selangkah berpantang surut, setapak berpantang mundur. Kondisi ini tak sedikitpun membuat Luky pantang menyerah. “Saya berusaha *strive for the best*. Kerja itu *all out*. *Love what you do and do what you love*.” Tahun berikutnya, Luky dan Hamid berencana membuat *side event* tentang perekonomian Indonesia saat World Congress of the *International Economist Association di Jordan*. Nantinya, *Stiglitz dan Bambang Brodjonegoro selaku Wakil Menteri Keuangan akan menjadi pembicara*.

Beberapa hari sebelum acara dimulai, tiba-tiba Bambang harus menghadiri sidang di Dewan Perwakilan Rakyat. Bambang meminta Luky untuk menggantikannya dan melobi Stiglitz agar bersedia datang dan menjadi pembicara. Lucky Luky, pada bulan Oktober, Stiglitz berencana ke Singapura sehingga ia bersedia menyempatkan waktunya untuk mampir ke Bali untuk menjadi pembicara.

“*This is one of my biggest achievements*. Bagaimana melobi Stiglitz sejak 2012, membuat *workshop* di Jordan dan mewakili Kementerian Keuangan presentasi di depan dia. Bagaimana saya berbicara langsung dengan dia, melobi dia, meyakinkan dia sampai akhirnya dia bersedia,” ujar pria yang mengidolakan



Dalam acara talkshow di televisi swasta.

Bersama Stiglitz, penerima nobel ekonomi.

Luky bersama keluarga.

Foto Dok. Pribadi

Stiglitz dan menggunakan karyanya sebagai referensi utama bahan disertasi doktoral.

Pada medio 2015, Luky diberi tugas berbeda sebagai Kepala Pushaka di Sekretariat Jenderal yang mengelola seluruh portofolio Menteri Keuangan. Lagi-lagi, *lucky* Luky, sejak awal triwulan kedua 2016, ia juga dipercaya sebagai jubiir Kementerian Keuangan yang kali pertama ditunjuk secara formal.

Penunjukkan ini bukan tanpa alasan. Di tengah era keterbukaan informasi publik, tuntutan kecepatan informasi menjadi hal yang mutlak. Di satu sisi, tugas dan fungsi Kementerian Keuangan semakin kompleks. Di sisi lain, pejabat pembuat kebijakan yang diambil kemenkeu tidak memiliki banyak waktu menjawab pertanyaan media sementara kebutuhan informasi makin dinamis.

“Media haus berita, lebih bagus kalau mereka dapat sumber yang memang terpercaya, benar-benar berkompeten, mempunyai relevansi. Kalau tidak ada, mereka mencari sumber lain yang diragukan kredibilitasnya, akurasinya.

Daripada mereka salah, ditunjuklah jubiir untuk berkomunikasi dengan media,” papar Luky.

Luky tak pernah membayangkan dirinya dapat ditunjuk sebagai jubiir. Meski demikian, Luky merasa pengalaman menjadi dosen serta pengalaman bekerja pada *Investor Relation Unit* di BKF tidak jauh berbeda dengan tugasnya sebagai jubiir, yakni sama-sama untuk *sharing* informasi. Hal terpenting, lanjut Luky ialah menjaga kualitas informasi dengan memilih informasi seperti apa yang layak dibagikan pada publik dan informasi apa yang harus tetap disimpan sendiri.

Keluarga nomor satu

Ayah dari Diva Muhammad Alfirman dan Daryl Ramadhan Alfirman ini merasa enam tahun bersekolah di luar negeri menjadi berkah terbesar khususnya dalam membangun kedekatan dengan keluarga. Hidup jauh dari Indonesia justru menciptakan ikatan kuat antara Luky, istri dan anak-anaknya.

Bagi Luky, lika liku hidup yang seperti *roller coaster* dapat terasa mudah

dihadapi dengan moral *support* dari keluarga. “Karier penting, tapi orientasi saya sekarang nomor satu ialah keluarga. Bagaimana membuat *Quality time* dengan keluarga, dengan waktu yang sedikit tapi berkualitas. Untuk saat ini memberikan pendidikan terbaik itu jadi kunci,” kata pria pecinta olahraga basket.

Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Luky masih berusaha menyempatkan diri menyalurkan hobi yang satu ini. Bahkan Luky selalu aktif berpartisipasi main basket pada turnamen Hari Keuangan setiap tahunnya. “Saya mungkin menjadi pemain yang paling tua di lapangan, *hahaha...*,” ucapnya sambil tertawa lepas.

Terakhir, Luky juga meyakini agar tidak melupakan Sang Pencipta. Luky hanya meminta kepada-Nya agar apa yang ia lakukan selama ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya pribadi tetapi juga bagi orang lain. “Kita tetap usaha *do the best* tetapi tidak boleh melupakan, semua itu ada yang mengatur. Saya *In shaa Allah Lillahi ta ‘alaa* saja.”

Teks lin Kurniati

Mulai Menatap ke Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati empat asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2017. Pada rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7), asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati di kisaran 5,2-5,6 persen. Sementara itu, asumsi inflasi disetujui di kisaran 3-5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada kisaran 5-6 persen, dan nilai tukar rupiah berada pada nilai Rp13.300-Rp13.600 per dollar Amerika Serikat (AS). Proses pembahasan RAPBN 2017 hingga saat ini masih terus berlangsung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa ekonomi domestik akan menjadi elemen

pendorong pertumbuhan ekonomi 2017. "Dengan melihat kondisi global, ekonomi domestik menjadi poin positif dari prospek pertumbuhan 2017," kata Menkeu pada rapat tersebut. Pemerintah, lanjut Menkeu, akan terus berupaya meningkatkan investasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman dalam wawancara dengan Media Keuangan di Jakarta, belum lama ini. Kondisi global diharapkan sedikit membaik, meskipun harga komoditas diprediksi tidak banyak mengalami peningkatan. Menurut Luky, pemerintah juga terus memantau perekonomian Tiongkok. Saat ini, Tiongkok adalah perekonomian nomor dua terbesar di

dunia dan untuk Indonesia, negeri adidaya di Asia tersebut merupakan mitra dagang nomor satu. "Apa yang terjadi di sana akan punya dampak yang signifikan untuk Indonesia," kata dia.

Perekonomian AS diharapkan membaik, meskipun kenaikan suku bunga Bank Sentral The Fed masih terus membayangi. Sementara perekonomian negara-negara Eropa dan Jepang diramalkan masih belum stabil. "Secara keseluruhan, diharapkan ada sedikit perbaikan pada perekonomian global," tutur Luky.

Diwawancarai di tempat berbeda, Kiki Verico, Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan di sela-sela rapat pembahasan RUU pengampunan Pajak dengan DPR. (27/06).

Foto
Anas Nur Huda

77 Komentor Pakar



Hadiyanto
Sekretaris Jenderal/
Ketua Panja RUU Tax Amnesty

"Kebijakan pengampunan pajak kali ini merupakan satu-satunya dan yang terakhir. Kami mengimbau para wajib pajak ikut membangun Indonesia melalui repatriasi dana dan terus berinvestasi di sini. Sejak RUU Tax Amnesty masih dalam proses dalam pembahasan, kami di Kementerian Keuangan sudah aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan sarana penampung dana *tax amnesty*. Kami, misalnya, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan BI untuk bisa memberikan fleksibilitas dalam investasi, khususnya yang berkaitan dengan repatriasi aset.

Kami ingin memastikan bahwa investor yang mengikuti program pengampunan pajak nyaman berinvestasi dengan berbagai instrumen yang sudah tersedia dan yang akan disediakan untuk menampung dana repatriasi. Kami akan membuka seluas-luasnya kesempatan untuk wajib pajak agar dana repatriasi itu bisa tinggal dalam waktu lama dan berkontribusi untuk pembangunan."

mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun. Mengutip data International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu diperkirakan akan berada pada kisaran 6,5 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6,9 persen. Akibatnya pertumbuhan ekonomi ASEAN akan terkena dampak. Dalam sepuluh tahun terakhir, keterkaitan ekspor dan impor ASEAN dengan Tiongkok semakin dominan. "Menurut perhitungan saya, dampak yang paling besar berdasarkan elastitas pertumbuhan ekonomi adalah pada Vietnam (0,85), Indonesia (0,76), Filipina (0,62), Malaysia (0,61), dan Thailand (0,31)," kata Kiki. Artinya jika ekonomi Tiongkok diperkirakan turun 0,4 persen, ekonomi Indonesia terpengaruh sekitar 0,76 dari 0,4 persen atau sekitar 0,3 persen.

Di sisi lain, pengaruh ekonomi AS terutama disebabkan posisi mata uang mereka sebagai alat transaksi internasional (*vehicle currency*) dan cadangan devisa utama Indonesia. Sering kali, posisi hubungan ekonomi Indonesia dan AS seperti pendulum. "Ketika ekonomi AS stagnan, arus modal bisa masuk ke negara *emerging countries* termasuk Indonesia, sehingga nilai tukar cenderung menguat, inflasi stabil, dan suku bunga dapat diturunkan," ujar Kiki. Sebaliknya jika ekonomi AS membaik, Indonesia harus waspada karena umumnya arus modal jangka pendek kembali ke negara-negara maju.

Pada 2017, pemerintah juga dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada lemahnya ekspor komoditi nasional. Net ekspor barang adalah satu-satunya *account* yang positif selain penerimaan sekunder di dalam neraca transaksi berjalan Indonesia saat ini. Dari sisi internal, serapan anggaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang masih rendah tak bisa diabaikan. Hal ini telah menyebabkan *multiplier* pembangunan ekonomi tidak optimal dan berpengaruh

pada rendahnya pertumbuhan dan pada akhirnya juga penerimaan pajak.

Pengaruh Brexit

Dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan *Brexit* diprediksi tidak akan terlalu signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Namun demikian, Agus Tony Poputra, Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi berpendapat bahwa *Brexit* dapat menjadi momentum untuk meningkatkan cadangan devisa emas Indonesia.

Menurut Agus, rentannya nilai mata uang suatu negara terhadap fluktuasi tajam terjadi karena negara-negara di dunia saat ini telah menggunakan rezim *Fiat Money*. Uang yang beredar di suatu negara tidak lagi dikaitkan dengan emas maupun perak di bank sentral. Konsekuensinya, nilai mata uang tergantung semata-mata pada kepercayaan pemakai dan negara pemiliknya. Jika banyak pihak percaya kepada suatu negara, maka nilai mata uang negara tersebut akan kuat. "Sebaliknya, jika orang kurang atau tidak percaya lagi, maka nilai mata uangnya akan terdepresiasi tajam dan bisa senilai lembaran kertas biasa," kata Agus.

Dalam kondisi begini, peningkatan jumlah emas moneter oleh Bank Indonesia (BI) dapat dipakai sebagai pengamanan nilai cadangan devisa dari pengaruh eksternal. Data yang dilansir World Gold Council per Juni 2015 menunjukkan cadangan emas dunia mencapai 31.949 ton. Indonesia hanya memiliki 78,1 ton atau 0,24 persen dari cadangan total. Bahkan di ASEAN, jumlah cadangan emas Indonesia lebih rendah dibandingkan Thailand dan Singapura, yang masing-masing berjumlah 152,4 ton dan 127,4 ton. "Dengan cadangan emas yang besar, BI bisa menjaga nilai cadangan devisa secara keseluruhan dan kestabilan rupiah dalam menghadapi dampak *Brexit* serta potensi terganggunya kondisi domestik AS," ujar Agus.

Perekonomian domestik

Untuk kondisi perekonomian domestik, Luky mengungkapkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur diharapkan mulai terasa tahun depan. "Makanya, secara domestik, kita berharap akan jauh lebih membaik kondisi perekonomian," kata dia. Range asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 dinilai menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian yang lebih baik.

Pada semester kedua 2016, pemerintah kini berfokus pada implementasi kebijakan pengampunan pajak. Dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan, Rabu (13/7), Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, Hadiyanto, menyambut baik respons pasar yang positif setelah UU Tax Amnesty disahkan. "Kalau pasar bereaksi positif, kami mempunyai keyakinan untuk terus menjalankan kebijakan ini," ujarnya.

Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang mendukung UU Tax Amnesty. "Dalam minggu ini, harus sudah kami selesaikan semua peraturan pelaksanaannya, misalnya yang menyangkut penunjukkan bank untuk menerima uang tebusan atau dana repatriasi," ujar Hadiyanto. Di samping itu, pemerintah juga memastikan persiapan hingga ke level teknis dilakukan dengan baik, antara lain urusan pengelolaan dan pengolahan data, penyiapan perangkat IT, dan dokumentasi berupa formulir yang harus disiapkan untuk wajib pajak agar lebih mudah mengikuti program pengampunan pajak.

Pengesahan UU Tax Amnesty akan menjadi pintu masuk reformasi peraturan perpajakan. Menurut Hadiyanto, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan rancangan perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). "Ini sangat monumental untuk reformasi perpajakan ke depan," kata dia. Selain revisi UU KUP, pemerintah juga mengupayakan revisi UU perpajakan lainnya.



Agus Tony Poputra
Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

"Brexit telah menekan nilai poundsterling ke titik terendah selama 31 tahun terakhir. Poundsterling tetap tidak kebal terhadap perubahan lingkungan. Kondisi yang sama dapat dialami mata uang kuat lainnya. Di lain sisi, saat ini AS sedang mendapat tekanan dalam negeri. Isu rasial mengalami eskalasi yang tajam dan bisa berujung pada terganggunya keamanan dan ekonomi negara tersebut secara masif. Faktor lainnya yang diperkirakan akan membawa pengaruh negatif adalah pemilihan presiden. Kedua calon presiden AS diperkirakan akan menghadapi tantangan berat.

Perkiraan situasi buruk yang bakal dihadapi AS berpotensi membuat dollar mengalami fluktuasi tajam di masa mendatang. Oleh sebab itu, BI perlu menata kembali portofolio cadangan devisa dengan memperbanyak emas moneter. Memang nilai emas juga mengalami fluktuasi, tetapi tetap memiliki nilai yang memadai. Peningkatan jumlah emas moneter oleh BI dapat dipakai sebagai pengaman nilai cadangan devisa Indonesia dari pengaruh eksternal."



Kiki Verico
Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEB Universitas Indonesia

"Investasi ke depan penting untuk diperhatikan. Kini investor asing punya ekspektasi positif pada Indonesia, termasuk dalam jangka panjang. Lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan pemerintah untuk menjaga ekspektasi ini? Hasil survey LPEM pada *Monitoring of Investment Climate VI* tahun 2014 dengan 345 responden industri menengah ke atas dan 187 perusahaan jasa di enam kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa prioritas dunia usaha adalah infrastruktur (listrik dan transportasi), perizinan pusat dan daerah, kepastian regulasi, dan kestabilan makroekonomi khususnya kestabilan nilai tukar.

Selain faktor utama ini, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan investor pada Indonesia. Beberapa faktor itu di antaranya adalah ketersediaan pekerja dengan keahlian dan pendidikan yang baik, peraturan ketenagakerjaan yang adil, dan ketersediaan lahan dengan proses pengadaan yang tidak rumit. Investor juga menaruh harapan pada stabilitas keamanan, komitmen pada pemberantasan korupsi, insentif pajak dan kepabeanan, serta penguatan infrastruktur."

Teks Dwinanda Ardhi

Kebijakan Transfer ke Daerah



Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa (1) Dana Perimbangan, (2) Dana Insentif Daerah, serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan



Dana Perimbangan bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) dan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh



Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY

Rp 0,547 Trilyun

Kebijakan APBN-P 2016

- 1 Meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa
- 2 Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH
- 3 Reformulasi alokasi DAU
- 4 Reformulasi dan penguatan DAK
- 5 Reformulasi DID
- 6 Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Rp 5 Trilyun



Menimbang Perlunya Kebijakan Khusus Pasca Brexit

Teks Wihana Kirana Jaya*

Konsep “*contagion effect*” atau ‘*repercussion effect*’ pada pelajaran pengantar ekonomi makro (*econ 101*) sangat mendasar dipergunakan untuk melihat dampak Brexit (*Britain Exit*) keluar dari Uni Eropa. Konsep tersebut menjelaskan secara sederhana di mana kebijakan suatu negara akan saling mempengaruhi satu dengan negara yang lain (*global market interdependence*). Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) akan berdampak, baik secara domestik bagi Inggris, negara-negara UE, maupun secara internasional terutama bagi *emerging countries*, termasuk Indonesia. Menurut teori aturan main ekonomi atau ekonomi kelembagaan (*economic rules of the game*), dapat dikatakan bahwa aturan main ekonomi sedang mengalami perubahan mendadak, tidak pasti, dan tidak berfungsi secara optimal dalam jangka pendek (*uncertainty institutions*).

Teori ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics* atau NIE) Ronald Coase (1937), Douglas North (1990), dan

Williamson (2000) juga dapat memprediksi peristiwa Brexit akan mempengaruhi aturan main baru ekonomi di UE dan Inggris yang akan menimbulkan biaya transaksi ekonomi. Hal ini sebagai akibat perilaku pasar bersifat oportunistik (*opportunist behaviour*) dalam melihat informasi yang asimetrik dan lemah di dalam penegakan. Selain itu, peristiwa Brexit akan mengubah syok keseimbangan ekonomi yang akan secara pelan-pelan berubah menuju keseimbangan baru melalui proses kekuatan negosiasi, aksi kolektif (*collective action*), dan tawar menawar (*bargaining power*). Sebagai contoh, Perjanjian Lisabon Pasal 50 menyebutkan waktu perpisahan Inggris dengan UE dalam dua tahun ke depan. Ada proses negosiasi yang panjang dan perlu disepakati seperti tarif, migrasi, dan *non tariff barrier*. Negara-negara UE menghendaki Inggris keluar dari UE dengan segera (16 September 2016 mendatang 27 pemimpin negara UE akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di Bratislava untuk membahas lebih lanjut

dampak dari keluarnya Inggris dari UE).

Dampak pantul dan penularan (*repercussion effect* dan *contagion effect*) Brexit terhadap Indonesia pasti ada, baik dalam jangka pendek maupun panjang, baik positif maupun negatif. Dampak ini bergantung pada situasi, interaksi, dan koneksitas perekonomian Inggris dan Indonesia ke depan. Dalam jangka pendek, Brexit menimbulkan *market shock* dan sentimen pasar yang terlihat dari tingkat kurs dan indeks harga saham gabungan. Namun, dampak ini tidak fundamental atau sifatnya *temporary*. Gejolak tersebut lebih digerakkan oleh faktor sentimen ketimbang faktor fundamental. Bank Indonesia menyatakan bahwa dampak Brexit relatif terbatas, baik terhadap pasar keuangan, kegiatan perdagangan, maupun terhadap investasi ke Indonesia. Stabilitas makro ekonomi tetap terjaga dan laju inflasi relatif rendah. Penurunan defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah juga cenderung dalam rentang aman dibandingkan dengan negara lain seperti India, Thailand, dan Korea Selatan.



Dampak Brexit di pasar barang berdampak, tapi relatif kecil dan hanya sesaat karena kontribusinya terhadap neraca perdagangan (ekspor-impor) relatif kecil dibandingkan dengan negara UE lainnya dan nilainya selalu surplus terhadap Indonesia. Selain itu, dampak pasar uang dari penerapan suku bunga negatif di Eropa dan Jepang masih terjadi. *Blessing in disguise* suku bunga negatif ini masih akan mendorong investor asing untuk mencari imbal (*return on investment*) yang relatif tinggi. Saat ini, Indonesia menjanjikan imbal yang tinggi disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Mungkin yang perlu diperhatikan adalah dampak tidak langsung dari

perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di UE, walaupun tidak sedrastis di Inggris. Akibat yang mungkin timbul adalah ekspor Asia, termasuk Indonesia, ke UE juga akan melambat. Pada awalnya akan ada ketidakpastian yang meningkat akibat Brexit, namun setelah reda investor sudah bisa menghitung risiko yang timbul. Dana yang keluar akan masuk kembali ke Indonesia. Inggris merupakan negara kesepuluh terbesar dalam jumlah investasi di Indonesia. Nilai investasi Inggris masih di bawah Singapura, Malaysia, Jepang, dan Belanda. Namun, dibandingkan negara-negara UE, investasi Inggris merupakan kedua terbesar setelah Belanda.

Dampak lain adalah gejolak di pasar modal dan pasar obligasi. Indonesia

mungkin justru dapat menangkap peluang momentum sentimen Brexit untuk meningkatkan modal investasi asing. Brexit akan mendorong investor mencari investasi yang lebih aman dan menyebabkan banyak investasi keluar dari UE, sehingga menjadi potensi bagi *emerging countries* termasuk Indonesia. Bersama negara-negara Asia lainnya, Indonesia bisa saja menjadi semakin perkasa ekonominya asalkan bisa memainkan peran integrasi kawasan termasuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan baik.

Dampak Brexit dan kampanye calon presiden Amerika Donald Trump mendorong ekonomi global makin proteksionis. Fenomena Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa bisa saja

Ilustrasi
Arfindo Briyan

menjadi inspirasi bagi beberapa negara ASEAN untuk keluar dari MEA, bila fakta perdagangan bebas ini ternyata malah merugikan suatu negara. Maka, dalam jangka pendek dampak Brexit bisa saja memicu proteksionisme di antara negara-negara MEA, padahal tujuan dibentuknya MEA adalah mendorong deregulasi dan mempercepat arus barang, jasa, investasi, dan manusia di antara anggota-anggota MEA.

Namun pertanyaannya apakah Indonesia perlu membuat kebijakan khusus sebagai antisipasi dampak Brexit? Apapun itu, pemerintah perlu segera melakukan berbagai kebijakan yang sifatnya lebih eketif, gesit, dan komprehensif untuk memperkuat ekonomi domestik (*domestic aggregate demand absorpsion*). Harapannya, ketika ada tekanan besar dari perekonomian global, ekonomi nasional masih kuat. Daya saing produk atau komoditas Indonesia perlu ditingkatkan. Penguatan daya saing dan penguatan produk lokal mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan protektif yang dilakukan negara lain pasca Brexit. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai barang ekspor jauh lebih kompetitif ketimbang barang impor.

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diberlakukan pemerintah tahun ini cukup signifikan mengurangi dampak sentimen negatif dari Brexit. Kebijakan *tax amnesty* akan menjadikan tambahan kapasitas fiskal pemerintah untuk lebih mandiri melalui tambahan *tax base*, repatriasi aliran modal masuk ke Indonesia, pertukaran informasi antarnegara, dan menciptakan *trustworthiness* terhadap pembayar pajak. Dampak dari penerapan pengampunan pajak mengakibatkan sentimen positif

bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan indeks harga saham gabungan.

Selain itu, pemerintah harus melakukan perubahan kebijakan strategi khusus menuju ekonomi digital. Kemajuan teknologi informasi, *big data*, *cloud computing*, dan *mobile* aplikasi sangat diperlukan dalam pengembangan *big data base*. Perekonomian ke depan akan sangat berubah dari industri tipe 2.0 menjadi tipe 4.0, sehingga bisnis model, strategi ekonomi, dan strategi industri berubah dengan digital ekonomi. Selain itu, di sektor keuangan kemajuan *financial technology (fin tech)* dan *bit coin* berkembang dengan cepat. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif maupun negatif. Kebijakan membangun arsitektur IT, prinsip-prinsip IT, dan tata kelola IT sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan ekonomi domestik dan luar negeri.

Last but not least, kebijakan khusus reformasi ekonomi kelembagaan dalam mendukung sektor investasi perlu terus dilanjutkan. Paket ekonomi jilid I sampai XII baru memenuhi kondisi dasar (*necessary condition*) perubahan ekonomi yang belum optimal atau kondisi cukup untuk menciptakan struktur insentif dan menekan biaya ekonomi (*sufficient condition*), terutama bagi semua pelaku ekonomi di pasar dan non-pasar. Strategi peningkatan insentif pasar dan non-pasar investasi sangat penting bagi Indonesia, sehingga perbaikan iklim investasi menjadi suatu keharusan. Kepastian hukum (*law enforcement*) dan pelaksanaan *good governance* juga masih harus diupayakan terutama di level pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Coase, R. H. (1937) The Nature of the Firm, *Economica*, 4, pp.386-405.
- Williamson, O.E. (2000). "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead." *Journal of Economics Literature* 38(3):595-613
- North, D.C (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/25/104648026/seberapa.besar.dampak.brexit.terhadap.ekonomi.indonesia>.
- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/17/190000326/BI.Nilai.Dampak.Brexit.Tak.Terlalu.Besar.ke.Indonesia?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=bisniskeuangan&
- http://nasional.kompas.com/read/2016/06/28/04140011/Pemerintah.Jangan.Terlalu.Percaya.Diri.Sebut.Dampak.Brexit.Tak.Signifikan?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=bisniskeuangan&
- <http://www.antaraneews.com/berita/569891/bi-pastikan-ekonomi-indonesia-tahan-dari-dampak-brexit>
- <http://economy.okezone.com/read/2016/06/27/278/1426756/dampak-brexit-berlanjut-saham-keuangan-buat-anjlok-wall-street>
- <http://wartaekonomi.co.id/read/2016/06/27/104615/hipmi-sebut-dampak-brexit-picu-proteksionisme.html>
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/06/28/548865/dampak-brexit-di-pasar-modal-indonesia-tak-seburuk-negara-lain>
- <https://www.selasar.com/ekonomi/brexit-dan-indonesia>
- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/27/090000626/Pilih.Brexit.Begini.Proses.Perceraian.Ingggris.dengan.Uni.Eropa?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
- http://www.antaraneews.com/berita/570802/27-negara-ue-larang-inggris-akses-pasar-bebas?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
- <http://internasional.metrotvnews.com/amerika/ybDIYxPk-menlu-as-sebut-brexit-mungkin-tidak-akan-pernah-terjadi>
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/26/153000826/ini.dampak.positif.brexit.bagi.negara.emerging.market.seperti.indonesia>

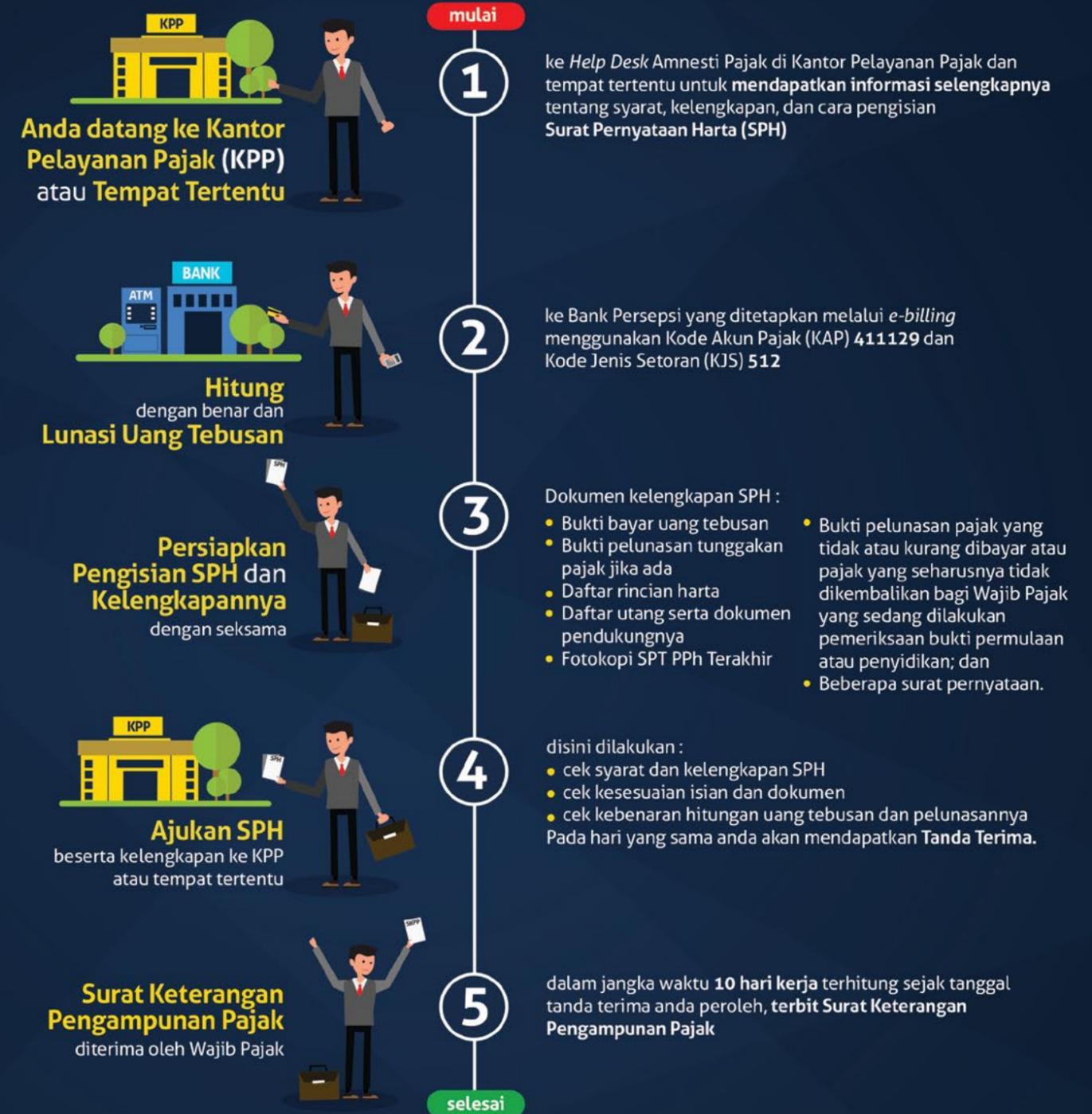
*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Infografis amnesti pajak

#Seri 3

Bagaimana?

cara memanfaatkan amnesti pajak?



Info lebih lanjut : www.pajak.go.id/amnestipajak



Calon Ahli Studi Lintas Budaya



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Rinatania Anggraeni Fajriani baru pertama kali menginjakkan kaki di luar negeri ketika tiba di Manchester, Inggris, pada tahun 2013. Gadis kelahiran Yogyakarta, 11 April 1988, itu meraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menimba ilmu di University of Manchester. Pengalaman pertama terbang ke benua Eropa membuka jalan Rina—panggilan akrabnya—menjelajahi kota-kota dunia yang lain. Paris, New York, Amsterdam, hingga Copenhagen kini telah disinggahnya. Beberapa konferensi internasional diikutinya. Di ibu kota Denmark, Rina tengah menjalani program S3 yang juga dibiayai oleh LPDP.

Sebagai bagian dari proses studi doktoralnya di University of Copenhagen, Rina perlu melakukan penelitian lapangan di tanah air. Ditemui di Jakarta belum lama ini, Rina bercerita tentang penelitiannya yang mengambil tema soal perkembangan kencana melalui Internet di Indonesia. Menurut Rina, situs dan aplikasi kencana daring berpotensi membentuk budaya baru dalam dunia digital. “Saya meneliti apa yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kita dalam menggunakan situs dan aplikasi itu,” kata dia.

Penelitian tersebut ternyata membawa Rina kepada persoalan penyebaran informasi di dunia digital yang lebih kompleks. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi rujukan utama payung hukum pengaturan situs web, termasuk situs web kencana di dunia maya. Persoalannya, dalam diskusi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang menjadi salah satu narasumber penelitiannya, Rina mendapatkan gambaran bahwa UU tersebut masih memiliki banyak kekurangan, belum lagi jika dikaitkan dengan banyaknya situs yang menampilkan informasi tidak layak.

“Sudah tidak terhitung jumlah portal yang masuk dalam *black list* (daftar hitam) Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujar Rina.

Fenomena merebaknya situs dan aplikasi kencana daring dikhawatirkan berbenturan dengan budaya dan pola pikir masyarakat. “Di negara asalnya, situs-situs kencana daring menjadi sarana untuk melakukan *intercourse* sebelum pernikahan,” kata Rina. Kondisi inilah yang perlu dimitigasi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian, Rina memakai pendekatan ilmu *cross cultural studies* (studi lintas budaya) yang didapatkannya di kampus.

Mempelajari akar permasalahan

Di Departement of Cross Cultural Studies, Rina diajarkan untuk melihat sebuah fenomena sosial secara komprehensif hingga ke akar permasalahan. Terbukanya arus informasi digital di tanah air saat ini, misalnya, mesti juga ditinjau dari latar belakang sejarah. “Contohnya, apa dampak keterbatasan akses pada masa Orde Baru terhadap keterbukaan informasi saat ini,” kata Rina.

Sebagai negeri yang kini lebih terbuka, proses transisi dalam menyerap teknologi sebaiknya dapat dilakukan secara bijaksana. Dalam contoh situs kencana daring, pola pikir yang berkembang di negara asalnya tentu tak bisa diimplementasikan begitu saja di sini. Begitu juga dengan isu-isu lain, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender yang dalam studi lintas disiplin ilmu mesti dikaji secara menyeluruh. “Istilahnya jika ada benang kusut, maka kami harus melakukan identifikasi mengapa benang tersebut menjadi kusut dan bagaimana cara terbaik untuk menguraikannya,” kata Rina.

Rina memiliki waktu untuk menyelesaikan penelitian lapangannya hingga Oktober tahun ini. Dia masih

akan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber untuk menambah data penelitian. Selepas Oktober, Rina akan disibukkan dengan kegiatan menulis makalah dan menyelesaikan tugas-tugas lain di Copenhagen. Belajar di Department Cross Cultural Studies bukanlah sebuah masalah bagi Rina. Sebelumnya, Rina merupakan sarjana lulusan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada. Untuk studi masternya, Rina mengambil jurusan Development Project di University of Manchester.

Menjadi asisten peneliti

Di samping kuliah, aktivitas Rina di Copenhagen juga disibukkan dengan tugas-tugas sebagai asisten peneliti di Asian Dynamics Initiative (ADI). “Lembaga penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan kerja sama Denmark dan negara-negara Asia, termasuk Indonesia,” ujarnya. Menurut Rina, jumlah mahasiswa Indonesia di Denmark tergolong sedikit jika dibandingkan dengan di negara-negara Eropa lainnya. Padahal setelah kunjungan Ratu Denmark ke Jakarta beberapa waktu silam, kedua negara tersebut memiliki ketertarikan untuk meningkatkan kerja sama bilateral. “Mereka kekurangan orang Indonesia yang memahami kondisi sosial terkini, aturan undang-undang, dan lain-lain,” kata Rina melanjutkan.

Melalui ADI, Rina telah beberapa kali terlibat dalam penyelenggaraan seminar dan pertemuan yang mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Sejumlah investor Denmark saat ini sedang menjajaki ekspansi ke Indonesia. “Misalnya perusahaan sepatu dan jasa perjalanan yang mau ekspansi ke sini,” ujar Rina. Peningkatan investasi ke Indonesia dipandang bagus karena dapat turut membuka lapangan pekerjaan. “Ternyata berdasarkan data terkini, hanya dua

persen saja nilai investasi perusahaan dari Denmark ke Indonesia,” tutur dia lagi.

Kegiatan sosial

Rina menyenangi kegiatan-kegiatan sosial. Dia merupakan salah satu pendiri Mata Garuda, ikatan alumni penerima beasiswa LPDP. Di Mata Garuda, Rina terlibat dalam proyek Kado Untuk Anak Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menyumbangkan alat-alat pendidikan ke daerah-daerah tertinggal di negeri ini. “Yang diutamakan adalah daerah di luar Pulau Jawa. Kami mengirimkan bantuan buku, alat tulis, sepatu, hingga membantu pendirian perpustakaan sekolah,” kata Rina.

Salah satu proyek nyata adalah penyaluran bantuan dalam bentuk seperangkat perlengkapan bola voli dan sepak bola, beserta sepatu untuk sebuah sekolah dasar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Rina, di sekolah tersebut, hanya ada satu guru yang mengajar. Jumlah muridnya sebanyak 67 siswa. Untuk bisa bersekolah, para murid harus berjalan kaki sekitar 19 kilometer setiap harinya.

Tak hanya melalui Mata Garuda, Rina juga menjadi salah satu inisiator Gemanesia. Proyek yang diprakarsai pada 2015 ini menyediakan kursus daring bersertifikat untuk para guru di seluruh Indonesia. “Kursusnya meliputi bagaimana mereka membuat proposal penelitian dan membuat praktikum-praktikum sederhana seperti roket air,” kata Rina.

Saat ini Rina sedang menjalani tahun kedua studi S3-nya. Di masa depan, dia bercita-cita menjadi peneliti dengan keahlian *cross cultural studies*. Rina melihat peran peneliti sangat penting, terutama dalam memberikan rekomendasi terhadap para pengambil kebijakan. “Saya akan berusaha masuk di situ (menjadi peneliti) supaya masukan-masukan bisa didengar,” ujar Rina menutup perbincangan.

Teks Dwinanda Ardhi



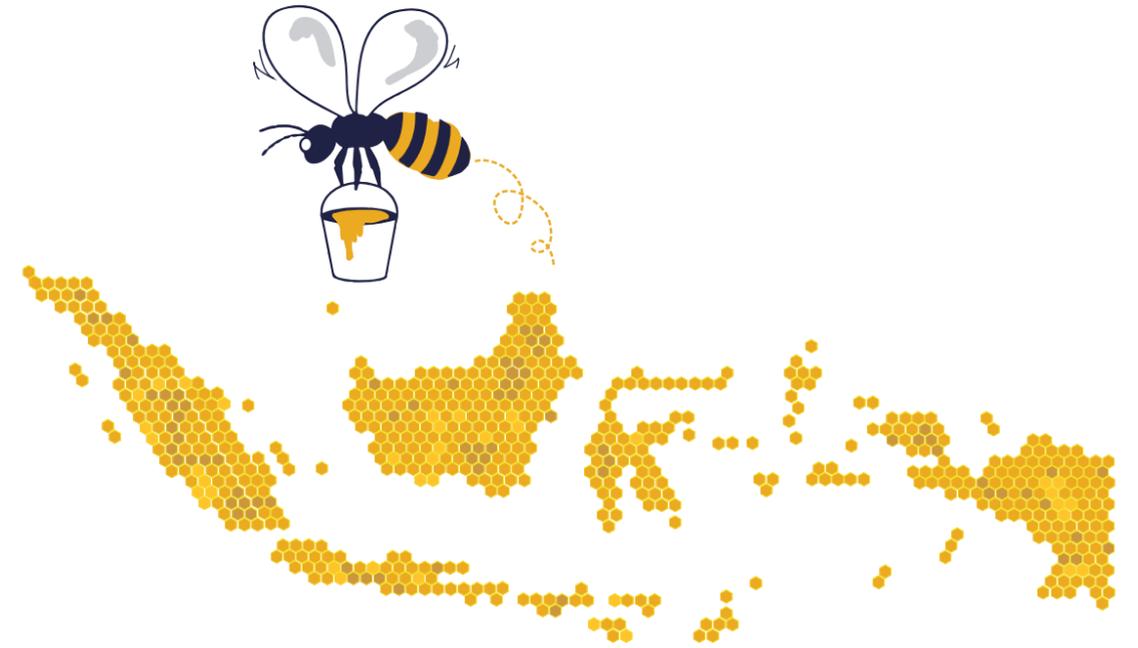
Rina berfoto di Times Square, New York, Amerika Serikat. Pada 2015, dia berkesempatan mempresentasikan makalah di New York Conference on Asian Study di Vassar College.

Foto
Dok. Pribadi

Urgensi Pembentukan Badan dan Penguatan Regeling Otoritas Pajak

Teks Akhmad Mukhatob, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ilustrasi
Arfindo Briyan



Aparatur pajak atau sering disebut fiskus, sering mengalami situasi sulit saat menghitung dan menetapkan pajak, biasanya karena ketidakjelasan suatu norma dalam undang-undang. Dalam situasi itu, keberadaan *regeling* (peraturan) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti Peraturan Dirjen Pajak, Surat Edaran dan berbagai bentuk *regeling* lainnya, sangat membantu fiskus dalam menjalankan kewenangannya. Sayangnya, beberapa pihak masih tidak mengakui *regeling* yang dibuat oleh DJP tersebut.

Sedih? Ya. Protes? Tentu. Bagaimana mungkin peraturan yang dibuat oleh otoritas pajak tidak diakui keberadaannya sebagai hukum positif yang mengikat. Ketika terjadi kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, siapa yang lebih berhak membuat penafsiran dan penegasan kalau bukan otoritas pajak? Bukankah salah satu fungsi pemerintahan (eksekutif) adalah fungsi pengaturan?

Kedudukan Peraturan Dirjen Pajak

Kalau dicermati, alasan beberapa pihak tidak mengakui *regeling* yang dibuat oleh DJP sebagai hukum positif yang mengikat setidaknya dapat ditinjau dari tiga alasan. Pertama, *regeling* yang dibuat oleh DJP tidak diakui dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, falsafah pajak sebagaimana tersirat dalam Pasal 23 UUD 1945 menghendaki agar pajak berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak tidak bisa didasarkan pada *regeling* yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Ketiga, sebagian *regeling* yang dibuat oleh Dirjen Pajak tidak ditempatkan dalam lembaran negara/berita negara.

Tentu kita harus menghormati ketiga alasan tersebut. Namun, ketiga alasan tersebut tetap dapat dikritisi. Secara umum, *regeling* yang dibuat oleh Dirjen Pajak didasarkan pada prinsip *freies ermessen* atau kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang leluasa dalam usahanya mencapai tujuan.

Prinsip inilah yang kemudian diakomodasi dalam UU Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini mendefinisikan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dirjen Pajak adalah pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang atribusi dari undang-undang pajak untuk menghitung dan menetapkan pajak. Kewenangan yang sangat besar ini mustahil dapat dijalankan kalau Dirjen Pajak tidak diberikan fungsi pengaturan. Dengan adanya fungsi pengaturan tersebut, tujuan kepastian hukum juga dapat tercapai. Fiskus tidak akan sewenang-wenang dalam menetapkan karena adanya batasan yang jelas dan tegas tentang suatu peraturan yang abstrak.

Sebagai ilustrasi, bagaimana perlakuan biaya pulsa telepon seluler yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam UU PPh diatur bahwa biaya

yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berhubungan dengan usaha. Biaya untuk kepentingan pribadi tidak dapat dikurangkan. Fiskus dapat saja mengoreksi seluruh biaya tersebut dengan alasan biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, Wajib Pajak tentu keberatan dengan koreksi tersebut karena telepon seluler sangat diperlukan dalam menjalankan usaha. Dengan terbitnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 yang mengatur pembebanan pajak 50 persen atas biaya tersebut, kepastian hukum bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak dapat tercapai.

Pembebanan 50 persen atas biaya telepon seluler adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam menjalankan kewenangan menetapkan pajak. Peraturan ini pada hakikatnya merupakan perbuatan tata usaha negara yang bersifat "*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*" atau menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Selain untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan,

peraturan tertulis membuka ruang bagi publik untuk menguji kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi melalui jalur uji materil ke Mahkamah Agung.

Urgensi Pembentukan Badan

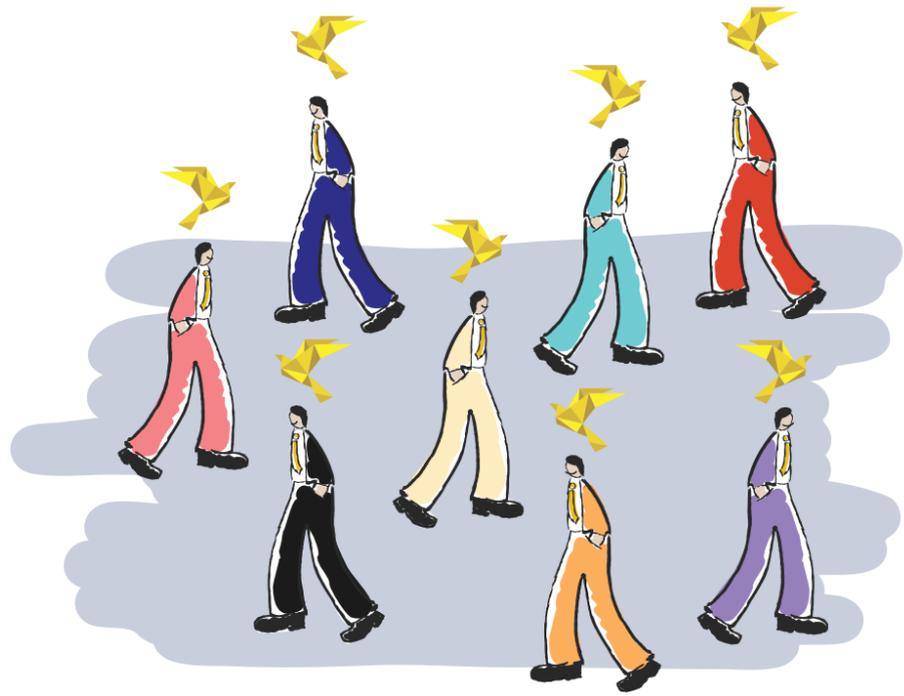
Salah satu solusi untuk mengatasi penolakan *regeling* yang dibuat otoritas pajak sebagai hukum positif yang mengikat adalah pembentukan Badan Penerimaan Pajak. Jika DJP sudah berbentuk badan, maka peraturan yang dibuat oleh badan tersebut akan diakui keberadaannya sebagai hukum positif.

Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya antara lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

Pembentukan organ pemerintahan

berupa badan tersebut harus berdasarkan undang-undang atau atas perintah undang-undang. Idealnya, Badan Penerimaan Pajak dibentuk dengan undang-undang seperti halnya Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang punya undang-undang tentang institusinya. Bila prasyarat ini terpenuhi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangannya dapat menempatkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan tersebut dalam Berita Negara sebagai syarat formal mengikatnya suatu peraturan.

Penguatan *regeling* yang dibuat oleh otoritas pajak sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Jika Badan Penerimaan Pajak sudah dibentuk berdasarkan undang-undang atau atas perintah undang-undang, maka segala *regeling* yang dibuat oleh badan tersebut secara formal mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Semoga cita-cita pembentukan Badan Penerimaan Pajak segera terwujud.



Semua Wajib Pajak Berhak Mendapatkan Pengampunan

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui, tanda disahkannya program pengampunan (amnesti) pajak pada 28 Juni 2016. Hal ini menjadi momentum penting bagi peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan. Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini kemudian menjadi dasar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendeklarasikan hartanya secara tepat, baik untuk harta yang berada di dalam negeri, maupun di luar negeri.

Melalui program ini, pemerintah menetapkan target tambahan penerimaan negara sebesar Rp165 triliun. Target ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara. Terlebih saat penerimaan baru mencapai Rp458,2 triliun pada akhir Juni 2016.

Menindaklanjuti persetujuan DPR, Presiden Joko Widodo melakukan respons cepat melalui penandatanganan UU Amnesti Pajak pada 1 Juli 2016. Selanjutnya pada hari yang sama, Presiden melakukan pencahangan program amnesti pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Serangkaian kegiatan sosialisasi turut dilaksanakan agar masyarakat memahami dan mendukung program ini.

Sebagai aturan pelaksanaan UU, Menteri Keuangan telah mengeluarkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Dua PMK dimaksud adalah PMK Nomor 118/PMK.03/2016 (PMK Nomor 118) tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Tata Cara

Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Sementara KMK yang ditetapkan adalah KMK Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Setiap Wajib Pajak Berhak Memanfaatkan

PMK Nomor 118 terdiri atas 26 bab. Hal yang diatur dalam PMK dimaksud meliputi tata cara tentang subjek dan objek amnesti pajak, surat pernyataan, wajib pajak UMKM, serta tata cara pembayaran uang tebusan dan pelunasan tunggakan pajak. Selain itu, diatur pula hal-hal terkait fasilitas amnesti pajak, bentuk investasi harta yang dialihkan dari luar wilayah Indonesia, serta manajemen data dan informasi.

Menepis isu yang beredar bahwa kebijakan amnesti pajak hanya untuk para koruptor yang melarikan hartanya ke luar negeri, PMK Nomor 118 menegaskan bahwa amnesti pajak menjadi hak setiap Wajib Pajak (WP). Meskipun semua WP berhak mendapatkan pengampunan, terdapat beberapa WP yang dikecualikan. WP tersebut yaitu WP yang masih dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah lengkap oleh kejaksaan, WP yang berada dalam proses peradilan, atau WP yang menjalani hukuman pidana terkait tindak pidana perpajakan.

Amnesti pajak diberikan terhadap kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yaitu untuk kewajiban yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh WP. Pengampunan tersebut terdiri dari kewajiban Pajak

Penghasilan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Surat Pernyataan sebagai Dasar

Untuk dapat memperoleh amnesti pajak, WP harus menyampaikan surat pernyataan yang berisi rincian harta, utang, nilai harta bersih, serta perhitungan uang tebusan. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menyampaikan surat pernyataan, yaitu telah memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak untuk WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Selain itu, bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, harus menyampaikan SPT PPh Terakhir.

Persyaratan lain yang diwajibkan adalah WP harus mencabut permohonan dan/atau pengajuan terkait beberapa hal. Diantaranya yaitu, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP), pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas STP, SKP, dan/atau surat keputusan, banding, gugatan, serta peninjauan kembali. Sementara itu, untuk pengalihan harta tambahan ke Indonesia, terdapat persyaratan tambahan, yaitu pengalihannya harus melalui bank persepsi yang ditunjuk serta harta tambahan harus diinvestasikan di Indonesia minimal selama tiga tahun.

Apabila persyaratan telah lengkap, surat pernyataan disampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar maupun tempat lain yang ditentukan. Penyampaian surat pernyataan dapat dilakukan paling banyak tiga kali, terhitung sejak UU Amnesti Pajak berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Penyampaian surat pernyataan kedua dan ketiga dilakukan apabila WP melakukan perubahan atas pengungkapan harta.

Fasilitas dan Pembebasan Sanksi
Setelah surat keterangan dari DJP diterbitkan, WP memperoleh beberapa fasilitas amnesti pajak, yaitu penghapusan atas pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya, serta pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Fasilitas lain yang diberikan adalah penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam periode yang sama dengan penghapusan pajak terutang. Selain itu, bagi WP yang masih dilakukan pemeriksaan pajaknya oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di DJP, tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penutup

Pasca ditetapkannya PMK tentang amnesti pajak, maka kebijakan sudah bisa diterapkan secara penuh. Kegiatan sosialisasi yang masif diperlukan agar pengusaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini. Penetapan tarif tebusan yang lebih rendah pada tiga bulan pertama, perlu diiringi dengan publikasi gencar di berbagai media, khususnya pada tiga bulan pertama sejak UU ditetapkan. Keberhasilan penerapan UU tentang Amnesti Pajak bukan tidak mungkin menjadi awal kebangkitan bagi perekonomian Indonesia.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Budi Sulistyio



Foto
Arfindo Briyan

Tarian Hati Ayuni

Gadis berusia lima tahun itu menari dengan apik mengikuti alunan gamelan Bali. Berbeda dengan teman sebayanya, ia menari dengan hati. Tanpa ambisi, tanpa beban.

Kini sang gadis telah beranjak dewasa. Ia biasa dipanggil Ayuni. Saat ini Ayuni mengemban tugas sebagai pegawai negeri sipil pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Tak banyak yang mengenalnya, tidak sejak tariannya memukau para juri dan penonton dalam ajang Setjen (Sekretariat Jenderal) Mencari Bakat tahun 2015 silam.

Ayuni lahir dan tumbuh besar di Denpasar, Bali. Pemilik nama lengkap Ni Ketut Ayuni ini mulai masuk sanggar tari sejak Taman Kanak-Kanak. Tepatnya, sanggar tari tersebut yang meminta Ayuni sebagai pemenang Juara I lomba tari untuk bergabung. Saat berada di Sekolah Dasar, kecintaan Ayuni terhadap seni tari semakin meningkat. Sebuah awal yang bagus bagi Ayuni dalam mempelajari seni tari, bahwa guru ekstrakurikuler tarinya saat itu menanamkan bahwa menari harus

dengan sepenuh hati.

Wanita kelahiran 4 Juni 1992 ini sungguh begitu berterima kasih pada Pak Komang, begitu guru tersebut biasa disapa. Hal ini ia rasakan saat membandingkan suasana berlatih menari di sekolah dengan di sanggar. Di sanggar tari, ia merasakan pelajaran tari yang diberikan terlalu teknis. Tidak ditanamkan bahwa menari sebaiknya dimulai dari rasa kecintaan terhadap tarian itu sendiri. Pertimbangan inilah yang membuatnya memutuskan untuk tidak mengikuti sanggar tari sewaktu duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Menari tanpa guru

Alih-alih mundur dari berlatih menari, Ayuni justru lebih giat mempelajari tarian secara mandiri. “Saat ini kita semakin dimudahkan dengan teknologi. Saya belajar menari sendiri

melalui video yang diunduh dari internet. Saya merasa lebih menguasai saat belajar sendiri daripada dengan guru,” tutur anak keempat dari lima bersaudara ini. Dengan berlatih mandiri, semakin banyak variasi tarian yang bisa dikuasainya. Pada dasarnya ia telah menguasai teknisi menari, tinggal memperbanyak variasi tari tradisional lainnya.

Berbagai tarian tradisional dari daerah yang telah dikuasainya antara lain tarian dari Melayu, Sumatera Barat, Sunda, Kalimantan, dan Papua. Tak disangka, Ayuni yang sedari kecil telah mempelajari tarian Bali justru menganggap tari Bali merupakan tarian yang paling sulit. “Dari semua tarian yang pernah saya pelajari, tari Bali yang paling tidak mudah. Khususnya tari Bali yang masih terjaga keasliannya dan berusia kuno seperti tari Legong. Tari Oleg Tambulilingan juga salah satu tari Bali yang sulit,” ujarnya. Tarian Bali sendiri bisa berjumlah ratusan jenis, tambah Ayuni yang memainkan tari Pendet saat mengikuti perlombaan pertamanya di taman kanak-kanak.

Semasa kuliah, Ayuni tidak hanya rajin berlatih mempelajari tarian baru, namun juga seringkali diminta mengisi berbagai acara internal STAN. STAN tiap tahunnya rutin mengadakan acara Heritage dan Organda (organisasi daerah) Expo. Selama tiga tahun berturut-turut, Ayuni berperan aktif dalam acara tersebut. Setelah unjuk kepiawaian

menari pada Heritage dan Organda Expo tahun 2011, tahun berikutnya Ayuni mencoba menjadi tim koreografer yang sukses meraih Juara I.

Menari tidak hanya memberikan kepuasan batin, namun juga mendapat bonus lain, yaitu badan yang bugar. Sejak kecil Ayuni memang sangat aktif berkegiatan fisik. Tidak hanya rajin menari, ia juga rutin berolah raga. Berenang adalah salah satu olah raga favoritnya. Uniknya, lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Denpasar ini sangat menyukai tantangan. “Saya lebih memilih diminta menaklukkan tarian yang sulit daripada harus mengikuti lomba menari dengan tarian yang sudah saya kuasai,” kata Ayuni yang juga ingin mencoba mempelajari *modern dance* ini sembari tersenyum.

Setjen Mencari Bakat

Setelah lulus dari STAN pada tahun 2013, Ayuni mundur sejenak dari kegiatan menari. Ia lebih banyak memfokuskan diri pada tugas baru di Subbagian Penegakan Displin dan Penghargaan Pegawai, Biro SDM. Sampai akhirnya ia diminta ikut serta dalam acara Setjen Mencari Bakat pada tahun 2015. Rekan-rekan Ayuni memintanya untuk ikut serta. “Saya berusaha menolak tawaran teman-teman. Lalu, tanpa saya tahu, ada salah satu teman yang mendaftarkan nama saya. Tiba-tiba saya diundang untuk mengikuti *technical meeting* babak semifinal,”



Aksi Ayuni menari.

Foto
Dok. Pribadi

ujarnya sembari tertawa.

“Saya merasa ada beban bahwa Biro SDM harus menang. Saat itu saya memilih tari Bali berjudul Kembang Girang, saya yakin saat itu pasti bisa menang,” tuturnya. Tak salah baginya untuk berusaha memberikan yang terbaik, namun ia lupa bahwa sesungguhnya menari harus dengan sepenuh hati. Sayang, dugaannya meleset. Ayuni tidak meraih peringkat I, namun berhasil lolos masuk lima besar terbaik dengan menduduki peringkat III.

“Saya menyadari, ketika ada motif lain di balik tarian saya, pasti hasilnya nanti tidak maksimal,” ungkap pengagum Didik Nini Thowok ini. Ayuni menebus kesalahannya saat babak final. Ia akan menari layaknya kecintaannya terhadap tarian tradisional selama ini. Antusiasme juri dan penonton saat itu sangat luar biasa. Tari Sunda berjudul Bajidor Kahot yang dibawakan Ayuni saat itu mampu memukau siapapun yang melihatnya. “Saya menari karena saya suka menari, bukan karena paksaan,” katanya.

Ayuni juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya minat generasi muda saat ini terhadap seni tari tradisional. “Waktu saya masih kecil, sanggar tari banyak sekali bermunculan di Bali. Sekarang bisa dikatakan hampir punah, walaupun ada jumlahnya sedikit sekali,” ujarnya. Saat berada di bangku Sekolah Menengah Atas pun, rekan-rekannya tak banyak yang berminat pada tari Bali dan tari tradisional lainnya. “Ekstrakurikuler *cheerleaders* (pemandu sorak) dan *modern dance* lebih banyak diminati,” lanjut Ayuni yang bercita-cita mengajar menari untuk anak-anak.

Semoga tarian-tarian Ayuni semakin banyak menginspirasi generasi muda lainnya. Mengingatkan kita bahwa keindahan dan kekayaan budaya tradisional adalah warisan yang patut dilestarikan keberadaannya. Teruslah menari, Ayuni!

Teks Pradany Hayyu

Prioritas, Waktu, dan Masa Depan

Apa yang paling banyak menyita waktu kita? Pikiran apa yang memenuhi kepala kita setiap kali bangun pagi? Apa informasi yang paling kita cari? Semua bergantung pada apa yang kita rasa paling penting dalam hidup.

Setiap orang memiliki prioritas yang berbeda. Satu hal yang sama, bisa berbeda derajat kepentingannya antara satu orang dengan yang lain. Hal ini pula yang menentukan cara kita bersikap, alternatif solusi yang kita ambil, hingga rencana masa depan yang kita susun. Sedemikian pentingnya ia, sehingga setiap orang perlu berhati-hati dalam menentukan prioritas dalam hidupnya.

Kegagalan dalam menentukan prioritas bisa berimbas pada capaian yang kita raih di masa depan. Padahal telah banyak waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan. Produktivitas, misalnya, juga bergantung pada skala prioritas yang kita susun sebelumnya. Dengan demikian, menyusun skala prioritas sudah selayaknya kembali kita galakkan demi mengefisienkan keterbatasan waktu yang kita miliki.

Stephen R. Covey, seorang penulis buku *First Thing First*, mengenalkan pentingnya mendahulukan hal yang benar-benar penting dalam hidup. Banyak dari kita gagal membedakan mana hal mendesak dan mana hal yang penting. Begitu banyak hal yang harus diselesaikan segera, tapi sayangnya tidak punya banyak pengaruh bagi masa depan kita. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya



penting untuk saat ini, tapi belum tentu untuk masa depan.

Hal inilah yang kemudian membuat kita lebih sering mengabaikan hal-hal yang berguna bagi masa depan. Berapa banyak dari kita yang bekerja keras dengan serentetan tugas mendesak, sehingga mengabaikan perencanaan untuk masa depan. Juga tidak sedikit waktu yang kita buang untuk sekadar menghibur diri dengan hal-hal yang boleh jadi tidak berdampak bagi perbaikan kualitas diri dan masa depan.

Padahal, ada begitu banyak kewajiban yang perlu kita selesaikan. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan banyak hak yang menuntut untuk dipenuhi. Keterbatasan waktu dengan segala kewajiban yang menyertainya, sudah selayaknya membuat kita kembali melakukan evaluasi. Sudahkah kita menentukan prioritas dalam hidup? Jika sudah, maka tepatkah prioritas yang kita pilih dan sejauh mana kita konsisten untuk memenuhinya?

Menentukan prioritas yang memiliki dampak bagi masa depan memang bukan perkara mudah. Sementara itu, menyelesaikan hal-hal mendesak dan segera juga penting untuk dilakukan. Termasuk sesekali menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ringan dan menghibur. Namun, jangan sampai hal ini menyita sebagian besar waktu dan perhatian kita. Cobalah berhenti sejenak dan bertanya. Layakkah waktu berharga kita habis untuk hal-hal yang boleh jadi tidak menambah kualitas diri dan masa depan?

Teks Farida Rosadi

Internet Movie Database (IMDb) mencatat sekurangnya 200 film tentang Tarzan telah dirilis per tahun 2014. Tidak hanya dalam film, karakter fiksi populer ciptaan Edgar Rice Burroughs ini juga telah berkali-kali ditampilkan dalam media lain seperti novel, serial TV, program radio, hingga buku komik. Di tahun 2016 ini, sutradara David Yates bersama penulis naskah Adam Cozad dan Craig Brewer menghidupkan kembali karakter Tarzan dalam film “The Legend of Tarzan”, dengan cerita yang dikemas lebih modern dan berbeda.

Mengambil latar tahun 1800-an, Tarzan (diperankan oleh Alexander Skarsgard) telah kembali ke rumah orangtuanya di Inggris. Ia melanjutkan hidupnya sebagai manusia yang beradab, dengan nama John Clayton III bergelar Lord Greystroke, bersama istrinya, Jane (diperankan oleh Margot Robbie). Atas undangan Raja Leopold dari Belgia, George Washington Williams (diperankan oleh Samuel L. Jackson) mewakili Perdana Menteri meminta John untuk ikut serta dalam ekspedisi menuju Boma di Kongo, Afrika, sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah tempat ia lahir dan dibesarkan sebagai Tarzan. Walau awalnya menolak, John dan Jane akhirnya *mengiyakan* undangan tersebut.

Pada saat itu Kongo menjadi wilayah kekuasaan Belgia atas kandungan mineralnya yang kaya. Untuk mengeksploitasi lebih banyak sumber daya mineral di sana, pada saat yang sama Raja Leopold mengutus Kapten Leon Rom

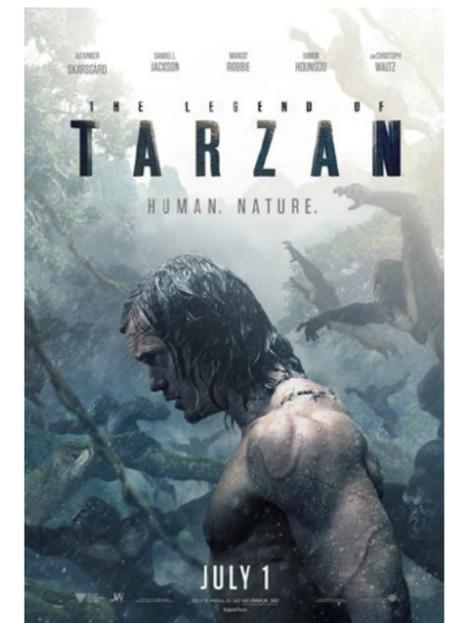
(diperankan oleh Christoph Waltz) untuk berdiskusi dengan Kepala Suku Mbonga (diperankan oleh Djimon Hounsou). Kepala Suku sepakat untuk memperbolehkan mereka mengambil mineral yang tersisa, asalkan Kapten Leon Rom bersedia menyerahkan Tarzan. Dari sinilah kejar-mengejar antara Kapten Leon Rom dan Tarzan dimulai, yang justru mengorbankan penduduk Boma beserta satwa rimba di sana.

Penceritaan “The Legend of Tarzan” banyak diisi *flashback* tentang bagaimana Tarzan dibesarkan oleh kera sampai bagaimana ia membaur dengan penduduk suku Boma yang telah ia anggap keluarganya sendiri. Tak lupa, *flashback* tentang kali pertama Tarzan bertemu Jane juga disuguhkan sebagai bumbu romansa, dalam beberapa adegan yang (sayangnya) kena gunting sensor. Terlepas dari adegan-adegan *action* yang seru, tema besar tentang imperialisme dan dialog-dialog yang intimidatif menjadikan materi cerita “The Legend of Tarzan” terasa lebih dewasa, sehingga saya kira film ini tidak tepat bagi anak-anak.

“The Legend of Tarzan” memberikan pelajaran bahwa, atas nama kekuasaan, seringkali manusia begitu mudah dipecah-belah. Dan dalam proses meraih kekuasaan, tidak hanya manusia yang akhirnya menjadi korban, tetapi juga lingkungan hidup dan satwa-satwa liar yang hidup di dalamnya. “The Legend of Tarzan” berhasil mendaur-ulang kisah klasik tentang si manusia rimba menjadi suguhan yang terasa baru dan berkelas.

Peresensi Akbar Saputra

The Legend of Tarzan: Kisah Klasik yang Dikemas Modern dan Dewasa





01



02



03



04

Terpikat Pantai-Pantai Sumbawa Barat

Barangkali geliat pariwisata Sumbawa belum sesemarak Bali. Padahal pulau ini berpotensi menjadi destinasi unggulan. Setidaknya, ada dua destinasi yang sudah mendunia. Pertama, Gunung Tambora dengan kawah indah akibat letusan dahsyat tahun 1815. Kedua, Pantai Lakey dengan ombaknya yang menjadi incaran peselancar.

Saya berkesempatan menyambangi pantai-pantai di bagian barat Sumbawa. Beberapa di antaranya baru pertama kali saya tahu namanya, misalnya Pantai Rantung. Pantai ini berada di wilayah Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat. Karakter ombaknya unik. Para peselancar menyebutnya ombak yoyo karena bergulung naik-turun seperti putaran yoyo. Di sebelah utara pantai terdapat tebing karang yang bentuknya menyerupai mulut hiu. Pada sudut tertentu, bulatan matahari yang terbenam tampak seolah akan ditelan hiu.

Tak begitu jauh dari Pantai Rantung, terdapat sebuah pantai tersembunyi. Pantai Lawar namanya. Jalan menuju ke pantai ini masih jelek dan sempit. Namun, perjuangan menuju ke sini terbayar setelah melihat panorama Pantai Lawar. Pantai ini dikelilingi tebing curam yang ditumbuhi pepohonan rapat. Benar-benar seperti sedang berada di tempat privat. Saya jadi teringat pulau tersembunyi di mana Leonardo DiCaprio menjelajah tempat terlarang pada film *The Beach*.

Bergeser ke Kecamatan Maluku, terdapat pantai dengan nama serupa. Beberapa tahun lalu, Pantai Maluku hanya berupa pesisir biasa yang sepi dan jarang dikunjungi. Kini area pantai telah ditata dengan infrastruktur pendukung. Di sepanjang pantai berjejer warung makanan lokal seperti raris dan pisang goreng sambal.

Di Pantai Maluku terdapat area konservasi penyu yang dibangun atas kerja sama pemerintah setempat dengan sebuah perusahaan tambang emas. Sebelumnya, masyarakat lokal terbiasa mengonsumsi telur penyu. Pantai-pantai di sekitar Maluku dan Sekongkang memang menjadi lokasi favorit penyu untuk meletakkan telurnya. Setelah bertelur, penyu menutupi lubang tempatnya bertelur lalu kembali ke laut.

Di area konservasi ini ada sebuah bak pasir untuk menetas telur penyu. Setelah menetas, tukik atau anak penyu akan dipindahkan ke kolam penampungan. Tukik dipelihara hingga usia enam bulan sebelum dilepas ke laut. Berdasarkan statistik, dari setiap 1.000 ekor tukik yang dilepaskan, hanya ada satu ekor yang bisa bertahan hingga dewasa. Dengan probabilitas yang sedemikian rendah, tentu upaya pelestarian penyu mendesak untuk dilakukan.

Bergeser ke Kecamatan Jereweh, ada sebuah pantai yang oleh masyarakat lokal disebut Pantai Poto Batu. Poto artinya ujung atau semenanjung. Di ujung pantai ini terdapat batu karang dengan lubang di tengahnya yang bisa dimasuki. Pantai Poto Batu terletak persis di tepi jalan yang menghubungkan Jereweh dengan Taliwang, ibukota kabupaten. Akses yang mudah membuat pantai ini ramai pengunjung, terutama saat menjelang senja.

Daerah terakhir yang saya kunjungi adalah Kertasari. Daerah ini dikenal sebagai penghasil rumput laut berkualitas tinggi. Pantai di sepanjang pesisir Kertasari juga memiliki panorama yang memanjakan mata. Pasir putih dengan air laut berwarna biru kehijauan menghampar sejauh mata memandang. Saat air laut surut, akan terbentuk gosong pasir atau daratan yang menghubungkan pantai dengan pulau karang di seberang.

01 Pemandangan matahari terbenam di Pantai Maluku.

02 Konservasi penyu di Pantai Maluku.

03 Batu karang di Pantai Poto Batu.

04 Konservasi penyu di Pantai Maluku.

05 Pantai Kertasari.

Foto
Adhi Kurniawan

Teks Adhi Kurniawan, Pegawai DJPK

Mengukur dan menimbang mana yang lebih penting berdasarkan *timing*. Itulah yang dilakukan oleh wanita bernama lengkap Lathifa Marina Al Anshori ini ketika kesempatan berkarier dan meneruskan studi datang pada saat yang bersamaan. Mantan kontributor Metro TV dan E TV News Afrika Selatan ini memilih jeda sejenak dari pekerjaan untuk melanjutkan kuliah.

Wanita kelahiran Samarinda, 20 Agustus 1991 ini mengaku sempat menjadi seorang yang *workaholic*. Aktivitasnya di berbagai bidang membuatnya merasa bahwa gelar Bachelor of Art in Political Science yang diraihinya dari Universitas Cairo Mesir dianggap masih cukup.

Namun kenyataannya, Lathifa sadar bahwa ada manfaat besar ketika memberanikan diri mengambil *career break*. Anak kedua dari tiga bersaudara ini nekat melanjutkan pendidikannya di University of Massachusetts, Boston, Amerika Serikat hingga meraih gelar Master of Arts in Conflict Resolution.

"Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Ilmu apapun itu, baik dari sekolah ataupun dari jalanan, cepat atau lambat pasti akan berguna dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberikan kita ilmu pengetahuan tanpa memberikan jalan supaya itu bermanfaat, baik untuk pribadi ataupun orang di sekitar kita," ujarnya.

Lathifa memberi masukan bagi para generasi muda yang belum memiliki pengalaman kerja sebaiknya tidak pilih-pilih pekerjaan terlebih dulu. Dalam tahun pertama bekerja, sebaiknya seseorang mengenali diri sendiri dengan mengetahui sejauh mana kinerja diri. Setelah dua tahun, barulah seseorang dapat mulai memilih-milih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.

Kemudian, bagi para generasi muda yang hendak berpindah karir, sebaiknya mereka mempertimbangkan sejumlah hal seperti gaji, *networking*, dan status posisi pekerjaan. "Saat kita harus memilih, ukurlah skala prioritasnya dan pilihlah mana yang baik. Kalau takut sesuatu akan sia-sia, minimal kita dapat pelajaran dari hal yang sia-sia itu," ungkapnya.

Menurut Lathifa, dalam kehidupan terkadang seseorang diberikan pilihan yang sama bagus dan sama sulitnya. Meskipun demikian, perempuan yang pernah meliput Revolusi Mesir dan konflik saudara di Libya ini sadar bahwa seseorang harus memilih mana yang lebih baik diantara pilihan-pilihan yang sulit tersebut.

Sama halnya ketika ia harus memilih antara karier dan pendidikan, ia sadar bahwa pilihan ini tidak mudah. "Kita bisa memiliki segalanya, tapi tidak di waktu yang sama. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah lupa," kata wanita yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR periode 2014 itu.



Foto
Dok. Pribadi

Career Break demi Sekolah

Teks Dhani Kurniawan



Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMD



KEMBALI UNTUK INDONESIA
DIRGAHAYU INDONESIA!!



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA